

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan individu atau anak-anak berkebutuhan khusus, secara riil ada di sekolah umum tidak hanya ada di sekolah luar biasa. Dalam kenyataannya, begitu banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang dapat kita temui di sekolah reguler terutama di sekolah-sekolah tingkat rendah seperti di sekolah dasar. Dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar, dimana ada karakteristik anak berkebutuhan khusus yang tidak begitu mencolok secara signifikan, menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk mengenalinya. Sebut saja anak-anak tunagrahita ringan dengan tingkat kecerdasan atau IQ 70/75 dan anak berkesulitan belajar spesifik. Kondisi dan keberadaan anak ini di sekolah tentu secara fisik tidak akan menampakkan perbedaannya secara signifikan. Untuk itulah guru-guru di sekolah dasar tersebut mengalami kesulitan dalam mengenalinya.

Dengan adanya ketidaktahuan guru sekolah dasar dalam mengenali anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah atau di kelasnya, maka hal ini akan berdampak bagi guru dalam memberikan layanan pembelajaran. Guru-guru bahkan tidak jarang memberikan label bagi anak-anak tersebut dengan sebutan yang kurang menguntungkan. Dengan adanya sebutan, persepsi yang salah dan akhirnya memberikan layanan pendidikan yang salah atau kurang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus maka hal ini akan merugikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Dengan adanya kesalahan persepsi dan kesalahan dalam memberikan layanan tentu akan berdampak dalam pengembangan potensi dari anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Model layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, yang sekarang ini sedang banyak dicobakan adalah model inklusif. Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan adanya pengelolaan yang baik. Manajemen sekolah dan manajemen kelas sangat memegang peranan penting dalam keberterimaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan manajemen yang baik maka pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak akan terlaksana dengan baik pula.

Keterlibatan manajemen sekolah tersebut antara lain: 1) menyamakan persepsi oleh warga sekolah yang dimotori oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan manajemen inklusif di sekolah tersebut, 2) menyusun program sekolah atau program kelas, 3) melaksanakan implementasi, 4) melakukan pendampingan, dan 5) melakukan sosialisasi ataupun publikasi. Dengan adanya keseriusan keterlibatan manajemen sekolah, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut dapat terselenggara dengan baik. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tersebut dapat memberikan keramahan dan keberterimaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

B. Tujuan Penelitian dan Pengembangan

Tujuan penelitian dan pengembangan dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Disamping itu, tentu ada tujuan penelitian dan sekaligus tujuan pengembangan. Tujuan umum merupakan tujuan utama dari penelitian ini, sedangkan tujuan khusus merupakan penjabaran isi dari tujuan umum. Pemilahan tujuan umum dalam tujuan khusus ini dimaksudkan untuk memperjelas komponen yang terkandung dalam tujuan umum. Dengan demikian spesifik produk yang diharapkan dapat lebih tercapai.

1. Tujuan umum

Tujuan umum penelitian pengembangan ini adalah tersusunnya model pengelolaan kelas dan terlaksananya desiminasi hasil penelitian pengembangan model pengelolaan kelas inklusif. Selain itu tujuannya adalah terumuskannya rekomendasi kebijakan terkait dengan buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Hasil pengembangan model pengelolaan kelas inklusif ini diharapkan memberikan solusi bagi sekolah.

2. Tujuan khusus

a. Tahun pertama (2013)

- 1) Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

- 2) Diperolehnya potret pengelolaan kelas yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar untuk di Provinsi DI Yogyakarta.
- 3) Tersusunnya analisis kebutuhan (*needs assessment*) sekolah dalam pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.
- 4) Terlaksananya proses pengembangan kerangka (*draft*) buku model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

b. Tahun kedua (2014)

- 1) Terlaksananya pemantapan *draft* buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.
- 2) Tersusunnya buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.
- 3) Terlaksananya ujicoba buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.
- 4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi ujicoba, yang hasilnya digunakan untuk merevisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta
- 5) Terlaksananya revisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.
- 6) Terlaksananya desiminasi hasil penelitian dan terumuskannya rekomendasi kebijakan terkait dengan buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

C. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan

Pentingnya penelitian dan pengembangan ini didasari oleh keberadaan individu berkebutuhan khusus. Secara nyata banyak anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan, dan tidak semuanya cocok di sekolah khusus. Mereka yang berkebutuhan khusus juga sangat mungkin mengikuti pendidikan di sekolah umum. Kesadaran akan *education for all*, telah menghantarkan sebagian dari mereka mengikuti pendidikan di sekolah inklusif.

1. Bagi sekolah penyelenggara pendidikan

Hasil penelitian dan pengembangan ini dapat dijadikan referensi atau rujukan tentang strategi dan cara pengelolaan kelas inklusif. Model ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan dan pelaksanaan pengelolaan kelas dan pembelajaran sehingga kualitas atau mutu pendidikan inklusif yang diselenggarakan dapat tercapai.

2. Bagi guru yang mengampu di kelas inklusif

Hasil penelitian dan pengembangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran tentang pengelolaan kelas, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran maupun strategi yang dapat diadopsi pada pelaksanaan pendidikan inklusif jenjang SD. Selain itu hasil penelitian pengembangan ini dapat dijadikan bahan bacaan atau rujukan tentang pengelolaan kelas inklusif.

D. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan

Pergeseran paradigma dari mengelola kelas yang sifatnya homogen menuju ke heterogen tentunya tidak mudah. Banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh guru, apalagi ada kecenderungan di sekolah guru kurang terbiasa menyiapkan perangkat pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian sangat mungkin sebagian besar pihak sekolah akan menentang kehadiran siswa berkebutuhan khusus menjadi peserta didik di sekolah reguler. Keraguan dan rasa pesimis guru dan

sekolah setidaknya akan berkurang bila diberikan dukungan, dan salah satunya adalah ketercukupan referensi tentang pendidikan inklusif. Bila banyak referensi dan kajian tentang pengelolaan kelas inklusif, maka sekolah akan semakin mantap melakukan penyelenggaraan kelas inklusif.

Asumsi

Sekolah dasar inklusif adalah salah satu bentuk layanan penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus sudah seharusnya dilakukan pengkajian sehingga akan diketahui tingkat keberhasilannya. Ada tiga tingkatan implementasi pendidikan inklusif yaitu: inklusif penuh, moderat dan sebagian. Secara teori tidak semua siswa berkebutuhan khusus harus dilayani di sekolah khusus, namun mereka dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Keramahan, dan keberterimaan kepada keberagaman siswa berkebutuhan khusus merupakan salah satu kunci keberhasilan sekolah inklusif.

Keterbatasan

1. Model yang dikembangkan berangkat dari kebijakan, berbagai permasalahan, atau realitas yang ada di sekolah tentang keberadaan siswa berkebutuhan khusus dan tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan inklusif tetapi kebijakan yang ada belum mendapat dukungan penuh dari banyak pihak. Peran supervisi sekolah, kepala sekolah, ataupun guru dan bahkan orang tua siswa yang merasa tidak berkebutuhan pun sering terjadi penolakan. Dengan demikian model yang dikembangkan belum tentu dapat diterapkan sama persis di sekolah.
2. Dalam proses pengembangan ini memerlukan analisis kebutuhan, dan revisi produk yang cukup matang, namun demikian revisi produk dalam pengembangan ini dilakukan dengan kajian teori pengelolaan kelas, namun fakta atau kondisi riil untuk masing-masing sekolah masih sangat bervariasi dalam menanggapi pendidikan

inklusif. Dengan demikian sangat dimungkinkan model yang dikembangkan juga harus dimodifikasi lagi oleh guru selaku pengelola kelas.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah yang dipandang perlu untuk diberikan penjelasan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah:

1. SD inklusif adalah salah satu bentuk layanan penyelenggaraan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus yang belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya yang tidak berkebutuhan khusus. Sekolah dasar inklusif adalah sekolah yang ramah dalam menerima terhadap keberagaman dan perbedaan kebutuhan pendidikan sehingga sekolah tersebut menyiapkan program, strategi dan metode pembelajaran serta penilaian yang bervariasi untuk mengakomodasi semua siswa.
2. Model pengelolaan kelas adalah pola-pola dan strategi yang dapat dilakukan dalam proses mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh guru yang di dalam kelas terdapat siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Pengelolaan ini baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang diawali dari perencanaan dan pelaksanaan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung.
3. Ujicoba dan uji kelayakan yang dimaksudkan dalam penelitian pengembangan ini dilakukan dengan mendiskusikan konsep yang dikembangkan untuk mendapatkan masukan dan penajaman dari berbagai sumber dalam rangka penyempurnaan model pengembangan. Ujicoba konsep ini dilakukan dengan diskusi dan konsultasi dengan kepala sekolah ataupun pihak yang terkait secara *face to face* ataupun diskusi dalam bentuk *Forum Group Discussion* (FGD) sebagai proses pengembangan dan penyempurnaan konsep pengelolaan kelas.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Anak Berkebutuhan Khusus

Pengertian anak kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan dan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, namun tidak signifikan sehingga mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, maka anak tersebut tidak termasuk anak kebutuhan khusus. Namun sebaliknya walaupun kelihatannya mereka secara fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional tidak mengalami kelainan namun apabila dalam pendidikannya mereka memerlukan layanan khusus maka anak tersebut dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Untuk memahami lebih lanjut anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan maka pengenalan mengenai anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan.

Pengertian anak berkebutuhan khusus berkembang sejalan dengan kesadaran dan kemajuan peradaban kita. Anak berkebutuhan khusus yang dulunya disebut sebagai anak cacat. Menurut Heri Purwanto, (2007:1):

Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut pemahaman terhadap hakikat anak berkebutuhan khusus. Keragaman anak berkebutuhan khusus terkadang menyulitkan guru dalam upaya menemukenali jenis dan pemberian layanan pendidikan yang sesuai.

Dalam pedoman direktorat PSLB, 2006, ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang sering kita temukenali, secara singkat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Karakteristik atau ciri-ciri yang menonjol dari anak tunanetra adalah: a. tidak mampu melihat, b. tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter erusakan nyata pada kedua bola mata, c. sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan, d. mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, e. bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/besisik/kering, f. peradangan hebat pada kedua bola mata, dan g. mata sering bergoyang. Karakteristik yang ada ini tentu tidak mesti semuanya muncul, namun bila sangat mendominasi dan mengganggu proses pendidikannya maka dikatakan sebagai anak tunanetra sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya.

Kedua, anak tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dalam kelompok tunarungu ini biasanya juga kita kenal adanya anak yang mengalami gangguan komunikasi yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Memang anak yang mengalami gangguan komunikasi tidak selalu disebabkan karena faktor ketunarunguan. Karakteristik anak tunarungu adalah: a. tidak mampu mendengar, b. terlambat perkembangan bahasa, c. sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, d. Kurangatau tidak tanggap bila diajak bicara, e. ucapan kata tidak jelas, f. kualitas suara monoton, g. sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, dan h. banyak perhatian terhadap getaran. Anak yang mengalami gangguan komunikasi memiliki karakteristik; a. sulit menangkap isi pembicaraan orang lain, b. tidak lancar dalam berbicara dan mengemukakan ide, c. sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, d. kalau berbicara sering gagap atau gugup, e. suaranya parau, f. tidak fasih mengucapkan kata-kata tertentu seperti celat atau cadel, dan g. organ bicaranya tidak normal.

Ketiga, anak tunagrahita atau sering disebut retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Tunagrahita dapat dibedakan menjadi tiga yaitu mampu didik, mampu latih dan mampu rawat. Adapun karakteristik anak tunagrahita adalah: a.

penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/ besar, b. tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia, c. perkembangan bicara/bahasa terlambat, d. tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan (pandangan kosong), e. koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali), dan f. sering keluar ludah dari mulut (ngiler). Anak tunagrahita terutama yang memiliki tingkat intelegensi antara 55-75 inilah yang sering luput dari perhatian guru di sekolah, karena guru tidak menyangka kalau siswanya tersebut termasuk anak tunagrahita sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Keempat, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) dan syaraf sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak tunadaksa jenisnya sangat banyak dan saat ini yang sering kita temukan adalah anak tunadaksa jenis cerebral palsy dan poliomyelitis. Adapun karakteristik anak tunadaksa adalah: a. anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh, b. kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali), c. terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa, d. terdapat cacat pada alat gerak, e. jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, f. kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Jenis anak tunadaksa ini mungkin guru sudah mampu mengenali namun sangat mungkin guru belum sampai memahami jenis apa dan bagaimana memberikan pelayanan yang tepat bagi mereka.

Kelima, anak tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Anak tunalaras secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut; a. bersikap membangkang, b. mudah terangsang emosinya/emosional/ mudah marah, c. sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, d. sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau hukum. Anak tunalaras ini dalam pengkajian selanjutnya sering disebut sebagai anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Dikatakan anak dengan gangguan emosi dan perilaku karena

lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan kemungkinan tindakan untuk memberikan layanan bagi anak tersebut.

Keenam, anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas tinggi, dan tanggungjawab terhadap tugas atau *task commitment* di atas anak-anak seusianya atau anak normal, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sangat banyak karakteristik yang melekat pada anak berbakat antara lain; a. membaca pada usia lebih muda, b. membaca lebih cepat dan lebih banyak, c. memiliki perbendaharaan kata yang luas, d. mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, e. mempunyai minat yang luas, f. mempunyai inisiatif dan dapat berkeja sendiri, g. menunjukkan keaslian (orisinalitas) dalam ungkapan verbal, h. dapat memberikan banyak gagasan, i. luwes dalam berpikir, j. terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, k. mempunyai pengamatan yang tajam, l. dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati, m. berpikir kritis, juga terhadap diri sendiri, n. senang mencoba hal-hal baru, o. mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi, p. senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah, q. cepat menangkap hubungan sebab akibat, r. berperilaku terarah pada tujuan, s. mempunyai daya imajinasi yang kuat, t. mempunyai daya ingat yang kuat, u. tidak cepat puas dengan prestasinya, dan sebagainya.

Ketujuh, anak lamban belajar atau anak *slow learner* adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang normal, mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak dengan lamban belajar memiliki karakteristik sebagai berikut; a. rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah, b. dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman seusianya, c. daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Anak-anak ini juga sangat mungkin sering luput dari perhatian guru, karena secara fisik atau penampilan fisik anak-anak ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dengan anak-anak pada

umumnya. Keberadaan anak lamban belajar sesungguhnya termasuk dalam jumlah yang banyak dan sering ditemukan di sekolah terutama di sekolah dasar di kelas rendah yaitu antara kelas satu hingga kelas tiga.

Kedelapan, anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika. Anak berkesulitan belajar spesifik diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensinya. Kebanyakan anak berkesulitan belajar spesifik memiliki inteligensi normal bahkan ada yang di atas normal tetapi mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca (dileksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan atau berarti. Anak yang mengalami kesulitan membaca (dileksia) maka perkembangan kemampuan membacanya terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah, dan kalau membaca sering banyak salah. Anak yang mengalami kesulitan belajar menulis (disgrafia) yaitu kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, sering salah menulis huruf b dengan p, p dengan q, v dengan u, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca, tulisannya banyak salah/terbalik/huruf hilang, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. Adapun anak yang mengalami kesulitan belajar berhitung (diskalkulia) adalah mereka yang sulit membedakan tanda-tanda: +, -, x, :, >, <, =, sulit mengoperasikan hitungan/bilangan, sering salah membilang dengan urut, sering salah membedakan angka 9 dengan 6; 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya, dan sulit membedakan bangun-bangun geometri.

Kesembilan, anak autisme adalah anak yang mengalami kelainan tumbuh kembang yang ditandai dengan tidak adanya kontak dengan orang lain dan asyik dengan dunianya sendiri. Mereka tidak tuli dan tidak tunawicara, mereka juga belum tentu berintelengensi rendah. Adanya keterlambatan dalam perolehan berbahasa dan perilaku bahasanya yang demikian maka dikatakan bahasanya "bahasa planet". Selain itu anak autisme juga mengalami gangguan komunikasi, berperilaku khusus, dan gangguan interaksi sosial. Anak autisme di Indonesia mencuat atau banyak dibicarakan baru diakhir tahun 90an, sedangkan di luar negeri sudah jauh dari itu sekitar tahun

50an. Anak-anak autisme paling banyak diderita oleh anak laki-laki. Secara sepihak, fisik anak autisme tidak menunjukkan perbedaan dengan anak-anak lain pada umumnya, hanya saja ketika kita panggil atau kita ajak berkomunikasi maka mereka tidak menunjukkan respon yang baik dan tidak ada kontak. Dengan adanya tanda-tanda yang demikian maka keberadaan anak autisme ini juga sangat mungkin ditemukan di sekolah dasar. Namun bagaimana mungkin guru di sekolah tersebut dapat menangani dengan baik bila belum memiliki pengetahuan tentang anak autisme termasuk melakukan identifikasi untuk mereka.

B. Kajian tentang Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif bertujuan: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pendidikan inklusif adalah salah satu bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pendidikan inklusif itu sendiri. Namun bila diperbandingkan antara kelebihan dan kekurangannya, maka pendidikan inklusif bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh lebih banyak memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan model atau bentuk segregasi atau sekolah khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan dukungan lebih banyak pihak, karena pendidikan inklusif akan menghadirkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelas atau di sekolah normal atau biasa ini sering menimbulkan permasalahan baik siswa lain secara langsung ataupun bahkan pihak orang tua wali.

Memiliki pemahaman yang jelas tentang pendidikan inklusif itu penting karena tergantung pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pemahaman itu, hasilnya dapat sangat berbeda.

Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit, atau didasarkan pada asumsi ‘anak sebagai masalah’ dan jika kemudian definisi tersebut digunakan untuk mengembangkan atau memonitor prakteknya, maka pendidikan inklusif akan gagal atau tidak berkesinambungan. Definisi pendidikan inklusif juga terus-menerus berkembang sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktek yang ada, dan sejalan dengan dilaksanakannya pendidikan inklusif dalam berbagai budaya dan konteks yang semakin luas.

Sebagaimana menurut Sue Stubbs dalam Didi Tarsidi, 2002. Definisi pendidikan inklusif harus terus berkembang jika pendidikan inklusif ingin tetap menjadi jawaban yang riil dan berharga untuk mengatasi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia. Pendidikan inklusif adalah penting sebagai jembatan untuk mencapai visi *education for all*, namun betapa tantangannya masih sangat berat karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif hanya merupakan versi lain dari Pendidikan Luar Biasa dan merupakan keinginan sepihak dari mereka. Konsep utama dan asumsi yang melandasi pendidikan inklusif adalah justru dalam berbagai hal bertentangan dengan konsep dan asumsi yang melandasi ‘pendidikan luar biasa’.

Permendiknas Nomor 70 tentang pendidikan inklusif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 bahwa (1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Selanjutnya pada ayat (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Selanjutnya pada pasal lima dalam permendiknas tersebut, bahwa (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima. (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Berbicara tentang pendidikan inklusif, sesungguhnya bukan hal yang baru. Merealisasikan pendidikan inklusif memerlukan kosekuensi yang tidak ringan, maka banyak pihak yang tidak mau peduli atau seakan-akan tidak tahu. Padahal sering didapati di sekolah atau di kelas reguler ditemukan adanya anak berkebutuhan khusus karena kecerdasannya tinggi, gangguan emosi perilaku, dan kelainan yang disebabkan faktor lainnya. Sebagaimana dikemukakan Jack L. Nelson, dkk. dalam *Critical Issues in Education Dialog and Dialectics* (2004):

Inclusion and mainstreaming: special or common education. ...Full inclusion of all children into school life is a fundamental principle in a free, democratic society. Full inclusion means that students classified "special" or "exceptional" because of individual physical or mental characteristics would not be isolated into separate schools, separate classes, or pull-out sessions.

Konsep inklusif seperti di atas tentu akan terus berkembang seiring dengan kesadaran manusia dan hasil analisis aplikasinya di sekolah. Di lapangan ada sekolah yang melaksanakan program inklusif penuh, sebagian atau moderat. Terlepas program inklusif mana yang diterapkan, namun yang penting adalah timbulnya kesadaran dari semua warga sekolah terutama guru dan kepala sekolah yang dipayungi oleh birokrasi yang ada di atasnya. Mengapa pihak siswa dan orang tua sebagai bagian dari sekolah tidak terlalu perlu dirisaukan. Bila semua sekolah telah menerima keberadaan siswa berkebutuhan khusus dan memberikan layanan yang terbaik, maka tidak ada pilihan bagi orangtua siswa yang "normal" untuk menyekolahkan putra putrinya. Namun demikian perjuangan panjang demi keberhasilan pendidikan inklusif masih harus terus dilalui.

Model layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari masa ke masa mengalami perubahan dan perkembangan. Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi, dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator dalam pengelolaannya. Namun demikian, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi ini sangat merugikan. Model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara filosofis model segregasi tidak logis,

karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka dipisahkan dengan masyarakat normal. Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa model segregatif relatif mahal.

Perkembangan selanjutnya mengenai model layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah model *mainstreaming*. Model pendidikan ini muncul pada pertengahan abad kedua puluh. Belajar dari berbagai kelemahan model segregatif, model *mainstreaming* memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Alternatif yang tersedia mulai dari yang sangat bebas (kelas biasa penuh) sampai yang paling terbatas (sekolah khusus sepanjang hari). Oleh karena itu, model ini juga dikenal dengan model yang paling tidak terbatas (*the least restrictive environment*), artinya seorang anak berkebutuhan khusus harus ditempatkan pada lingkungan yang paling tidak terbatas menurut potensi dan jenis/tingkat kebutuhan atau kelainannya. Namun sayang model *mainstreaming* pun juga tidak dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Padahal bila dicermati layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang dikemukakan Deno (1970) ada beberapa tingkatan atau hirarki sebagai berikut: 1) kelas biasa penuh, 2) Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam, 3) Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas, 4) Kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa, 5) Kelas khusus penuh, 6) Sekolah khusus, dan 7) Sekolah khusus berasrama. Mestinya berbagai hirarki tersebut dapat dipilih agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang sekarang ini marak di sekolah-sekolah reguler adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sekolah ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara formal. Prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang menghadirkan individu berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Banyak alasan mengenai pentingnya pendidikan inklusif ini, namun demikian penyelenggaraan pendidikan tidak bersih dari kritik ataupun pro kontra. Walaupun

pendidikan inklusif ini telah banyak dasar hukum yang mendukungnya, seperti Deklarasi Bandung, Permendiknas No. 70 tahun 2009, dan lain-lain. Namun terlepas dari pro kontra, pendidikan inklusif ini sekarang mulai tumbuh di Indonesia.

Sebagaimana menurut Sue Stubbs dalam Didi Tarsidi (2002). Definisi pendidikan inklusif harus terus berkembang jika pendidikan inklusif ingin tetap menjadi jawaban yang riil dan berharga untuk mengatasi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia. Akhirnya, mendefinisikan pendidikan inklusif itu penting karena banyak orang masih menganggap bahwa pendidikan inklusif hanya merupakan versi lain dari PLB. Konsep utama dan asumsi yang melandasi pendidikan inklusif adalah justru dalam berbagai hal bertentangan dengan konsep dan asumsi yang melandasi 'pendidikan luar biasa'.

Pendidikan inklusif berupaya memposisikan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu, dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural. Selain itu pendidikan inklusif berupaya agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, dan terutama dalam bidang pendidikan, sehingga menjadi generasi penerus yang handal, individu yang bermartabat. Untuk itu agar dalam pelaksanaannya terutama di sekolah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka keterlibatan manajemen sekolah menjadi sangat penting. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan adanya pengelolaan yang baik. Manajemen sekolah sangat memegang peranan penting dalam keberterimaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan manajemen yang baik maka pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak akan terlaksana dengan baik pula.

C. Kajian tentang Model Pengelolaan Kelas

Betapa penting melakukan pengelolaan dalam kehidupan ini. Apapun harus dikelola dengan baik bila ingin mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Kegiatan yang skalanya kecil sekalipun, bila dikelola dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan hasil yang

maksimal dan optimal dalam arti efektif dan efisien. Pengelolaan kelas didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guru dalam menciptakan kondisi kelas adalah melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru-siswa secara timbal balik dan efektif, selain melakukan perencanaan atau persiapan mengajar.

Pengelolaan kelas adalah bagian penting dalam upaya mencapai keberhasilan sekolah. Dengan adanya pengelolaan yang baik, diharapkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan kelas adalah upaya guru dalam mengorganisasikan seluruh sumberdaya yang ada di kelas dan unsur-unsur yang diperlukan untuk keberhasilan proses pendidikan. Ada beberapa hal penting yang harus dipikirkan dalam mengelola kelas yang tercermin dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasinya. Setidaknya Jones (2012) mengingatkan tentang empat komponen utama manajemen kelas yaitu tentang kelas yang efektif, menciptakan lingkungan kelas yang tertata baik dan aman, menyediakan aktivitas instruksional yang mendukung semua siswa untuk belajar, dan menanggapi secara efektif perilaku siswa yang mengganggu lingkungan belajar. Untuk itu kelas harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar kenyamanan siswa teradi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Pengelolaan kelas atau manajemen kelas dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *classroom management*. Dengan demikian pengelolaan identik dengan manajemen, dan sudah dipahami bahwa dalam pengelolaan atau manajemen pada umumnya dikenal dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian atau perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Wilford A. Weber (James M. Cooper, 1995: 230) mengemukakan *classroom management is a complex set of behaviors the teacher uses to establish and maintain classroom conditions that will enable students to achieve their instructional objectives efficiently – that will enable them to learn*. Pengelolaan kelas merupakan seperangkat perilaku yang

kompleks dimana guru menggunakan untuk menata dan memelihara kondisi kelas yang akan memampukan para siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Dengan demikian pengelolaan kelas harus dirancang dengan sebaik-baiknya oleh guru.

Dalam pengelolaan kelas atau manajemen kelas inklusif tentu harus didesain sebaik-baiknya agar siswa berkebutuhan khusus dapat belajar dengan nyaman. Menurut Djauzak Ahmad (1994) manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Adapun tujuan manajemen atau pengelolaan kelas (ibid, 1994) adalah:

- 1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin.
- 2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar.
- 3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas.
- 4) Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya.

Ada beberapa pandangan yang bersifat filosofis dan operasional dalam pengelolaan kelas. Pandangan tersebut setidaknya berkaitan dengan pendekatan yang dapat dilakukan guru, yaitu:

- 1) pendekatan otoriter: siswa perlu diawasi dan diatur;
- 2) pendekatan intimidasi: mengawasi siswa dan menertibkan siswa dengan cara intimidasi;
- 3) pendekatan permisif: memberikan kebebasan kepada siswa, apa yang ingin dilakukan siswa, guru hanya memantau apa yang dilakukan siswa;
- 4) pendekatan pengajaran: guru menyusun rencana pengajaran dengan tepat untuk menghindari permasalahan perilaku siswa yang tidak diharapkan;
- 5) pendekatan modifikasi perilaku: mengupayakan perubahan perilaku yang positif pada siswa;
- 6) pendekatan iklim sosio-emosional: menjalin hubungan yang positif antara guru-siswa;
- 7) pendekatan sistem proses kelompok/dinamika kelompok: meningkatkan dan memelihara kelompok kelas yang efektif dan produktif.

Dalam manajemen kelas, sebagai upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan sebagai wujud keterlibatan manajemen sekolah, maka sekolah akan berupaya mengembangkan model-model pembelajaran dan memilih model yang dipandang paling menguntungkan dan optimal bagi pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus. Model yang dapat dikembangkan oleh sekolah misalnya; 1) *Consultant Model*, yaitu guru sebagai konsultan lepas, turut merancang dalam hal asesmen, pengembangan materi dan modifikasi kurikulum. 2) *Teaming Model*, yaitu guru sebagai konsultan merangkap pendidik intensif di kelas turut membantu mengembangkan materi dan strategi pembelajaran. 3) *Co-Teaching Model*, yaitu guru khusus (yang memahami anak berkebutuhan khusus) dan guru umum bekerja sama berbagi peran di dalam kelas. Dalam *Co-Teaching Model* ini bisa dibedakan dan dipilih misalnya: (a) *One Teacher-One Support*, yaitu satu guru dan satu orang guru pendukung (guru terlatih/psikolog) bertanggung jawab pada satu kelas. (b) *Parallel Teaching Design*, yaitu guru membagi kelas menjadi dua kelompok. Satu kelompok oleh guru biasa dan satu kelompok untuk guru pendukung. (c) *Station Teaching*, yaitu satu materi satu guru sehingga terjadi perputaran dalam mengajar. Semua guru diharapkan memahami perkembangan anak berkebutuhan khusus. (d) *Team Teaching*, yaitu guru dan pendukung bersama mengisi pertemuan di kelas.

Sebagaimana dikemukakan Hermanto, (2010). Sebagai bentuk keterlibatan manajemen sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sesungguhnya kegiatan ini sangatlah banyak. Dari kepala sekolah sebagai pemegang legalitas formal tertinggi, mempunyai tugas sebagai: 1. Penanggung jawab manajemen di sekolah. 2. Melakukan ikrar pelibatan manajemen bahwa sekolah siap melaksanakan pendidikan inklusif. 3. Menetapkan kebijakan mutu kaitannya dengan inklusif. 4. Memastikan tujuan mutu telah ditetapkan & dikomunikasikan. 5. Melakukan tinjauan manajemen. 6. Memastikan tersedianya sumber daya & dukungan dari semua pihak dalam keterlaksanaan pendidikan inklusif. Begitu juga wakil kepala sekolah, maka sebagai wakil kepala sekolah urusan inklusif atau sebagai koordinator inklusif di sekolah harus selalu melakukan proses pengembangan dan penyempurnaan sistem inklusif di sekolah. Bertanggungjawab merumuskan program-program pendidikan inklusif di sekolah. (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi). Melakukan sosialisasi, koordinasi, kerjasama, dengan berbagai pihak untuk keberhasilan pendidikan inklusif di

sekolah. Berusaha mengurangi ketergantungan dengan guru pembimbing khusus dalam menyiapkan pembelajaran kompensatoris.

Dengan adanya keterlibatan manajemen sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka sekolah tentunya akan berusaha membentuk tim pengkaji tentang pendidikan inklusif, melakukan pemahami tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Sekolah akan berusaha memahami konsep pendidikan inklusif dan melakukan proses evaluasi tentang pelaksanaan inklusif di sekolahnya. Melakukan komunikasi dan mengkoordinasikan hasil analisis untuk mendapatkan tanggapan dari warga sekolah & dukungan dari pihak lain. Sekolah tentunya akan melakukan pengambilan keputusan untuk terus maju dalam penyelenggaraan inklusif dan didukung dengan membuat *action plan*. Meningkatkan pemahaman/komitmen bersama juga penguatan SDM Guru Non GPK menjadi bagian yang akan terus dilakukan. Dengan adanya keterlibatan manajemen sekolah maka sekolah penyelenggara inklusif tentunya akan melakukan langkah-langkah nyata dalam mendukung tercapainya pendidikan inklusif di sekolah tersebut dengan program; 1. Penguatan manajemen, 2. Melaksanakan asesmen ABK, 3. Merancang & menyiapkan Program Pembelajaran Individual, 4. Merancang modifikasi kurikulum, 5. Merancang modifikasi pembelajaran. 6. Merancang modifikasi penilaian & evaluasi. 7. Melakukan proses pendampingan. 8. Penyediaan fasilitas atau sarana prasarana. dan 9. Membangun jejaring dan keterlibatan dengan pihak lain.

Guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang mempunyai peranan yang strategis yaitu orang yang merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di kelas, orang yang akan mengimplementasikan kegiatan yang direncanakan dengan subjek dan objek siswa, orang menentukan dan mengambil keputusan dengan strategi yang akan digunakan dengan berbagai kegiatan di kelas, dan guru pula yang akan menentukan alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul; maka dengan tiga pendekatan-pendekatan yang dikemukakan, akan sangat membantu guru dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Guru dalam melakukan tugas mengajar di suatu kelas, perlu merencanakan dan menentukan pengelolaan kelas yang bagaimana yang perlu

dilakukan dengan memperhatikan kondisi kemampuan belajar siswa serta materi pelajaran yang akan diajarkan di kelas tersebut.

Menyusun strategi dalam pengelolaan kelas inklusif untuk mengantisipasi apabila hambatan dan tantangan muncul agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengelolaan kelas akan menjadi sederhana untuk dilakukan apabila guru memiliki motivasi kerja yang tinggi, dan guru mengetahui bahwa setiap siswa adalah unik dan setiap siswa membutuhkan perlakuan yang bervariasi maka guru akan melakukan pengelolaan kelas secara lebih arif dan bijaksana. Model-model pengelolaan kelas harus dilakukan dan didasarkan atas dasar kondisi siswa yang ada, apabila siswanya homogen barangkali pengelolaan secara homogen adalah tepat, akan tetapi akan sangat berlawanan bila kondisi siswanya heterogen atau inklusif tetapi dikelola secara homogen. Itulah tantangan dan kebutuhan untuk melakukan perencanaan matang yang harus dilakukan guru sebagai manajer kelas agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BAB III METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Banyak model dan versi tentang *Research and Development* (R&D), menurut Borg and Gall (2007), yang dimaksud dengan model penelitian dan pengembangan adalah “*a process used develop and validate educational product*”. Kadang-kadang penelitian ini juga disebut ‘*research based development*’, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, R&D juga bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui ‘*basic research*’, atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis melalui ‘*applied research*’, digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan. Kegiatan *Research and Development* dimanfaatkan untuk menghasilkan pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar. Dengan demikian hasil ini harapannya dapat lebih bermanfaat karena didasarkan hasil penelitian.

Sebagaimana menurut Borg dan Gall (2007), pendekatan (R&D) dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. Model teoritik adalah model yang menggambarkan kerangka berfikir yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Langkah penelitian dan pengembangan adalah: 1) *Research and information collecting*, 2) *Planning*, 3) *Development of the preliminary form of the product*, 4) *Preliminary field testing*, 5) *Main product revision*, 6) *Main field testing*, 7) *Operational product revision*,

8) *Operational field testing*, 9) *Final product revision*, 10) *Dissemination and implementation*. Kesepuluh langkah ini sering dikelompokkan dalam tiga fase yaitu fase konseptualisasi, fase instrumentasi, dan fase penerapan.

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Pokok-pokok kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana dikemukakan Borg dan Gall (2007). Kesepuluh langkah tersebut dioperasionalkan dalam tiga fase kegiatan penelitian dan pengembangan. Ketiga fase itu adalah fase konseptualisasi, fase instrumentasi, validasi, dan empirisasi, dan fase penerapan. Ketiga fase ini mencakup 10 langkah di atas, sehingga bila dikelompokkan dalam fase perencanaan menjadi sebagai berikut. 1) Fase konseptualisasi meliputi: *Research and information collecting*, dan *Planning*. 2) Fase instrumentasi, validasi, dan empirisasi meliputi: *Development of the preliminary form of the product*, *Preliminary field testing*, *Main product revision*, *Main field testing*, dan *Operational product revision*. 3) Fase penerapan, yaitu *Operational field testing*, *Final product revision*, dan *Dissemination and implementation*.

1. Studi Pendahuluan

Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literature, penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan.

- a. Analisis kebutuhan: Untuk melakukan analisis kebutuhan ada beberapa kriteria, yaitu
 - 1) Apakah pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif sebagai produk yang akan dikembangkan merupakan hal yang penting bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan pihak dinas pendidikan? 2) Apakah model pengelolaan kelas inklusif memungkinkan untuk dikembangkan? 3) Apakah guru dan kepala sekolah memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan

inklusif sebagai produk tersebut? 4) Apakah cukup waktu untuk mengembangkan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif di DIY tersebut?

- b. Studi literatur: Studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif di DIY yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan pengembangan produk model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif yang direncanakan. Literatur ini terutama yang berhubungan dengan model atau pola-pola pengelolaan kelas inklusif.
- c. Riset skala kecil: Pengembang sering mempunyai pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mengacu pada *research* belajar atau teks profesional. Oleh karenanya pengembang perlu melakukan riset skala kecil untuk mengetahui beberapa hal tentang model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif yang akan dikembangkan dirasa penting. Untuk itu pada tahap ini, paling tidak peneliti berupaya untuk melakukan wawancara secara langsung kepada pihak dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru, bahkan kepada orangtua siswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan substansi kebutuhan dan sekaligus sebagai bahan dalam menyusun draft pengembangan substansi komponen dan indikator serta model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Merencanakan Penelitian

Setelah melakukan studi pendahuluan, pengembang model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif melanjutkan langkah kedua, yaitu merencanakan penelitian. Perencanaan R&D meliputi: 1) merumuskan tujuan penelitian; 2) memperkirakan dana, tenaga dan waktu; 3) merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. Rumusan tujuan penelitian ini sebagaimana yang

telah dipaparkan pada bab pertama, sehingga peneliti berupaya untuk dapat menjawab rumusan penelitian tersebut.

3. Pengembangan Desain

Pengembangan desain ini adalah memadukan antara hasil penelitian sebagai kebutuhan lapangan dengan teori pengelolaan kelas yang melandasinya. Langkah pengembangan desain ini meliputi: 1) menentukan desain produk yang akan dikembangkan (desain hipotetik); 2) menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan; 3) menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan; 4) menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Dalam tahap ini pengembang atau peneliti berupaya mengembangkan konsep dan modul model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Tahap ini merupakan penerjemahan konsep yang dikembangkan berdasarkan hasil kebutuhan di lapangan, sehingga sangat diharapkan hasil pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif ini aplikatif digunakan.

4. Preliminary Field Test

Pada tahap ini, peneliti bermaksud untuk memperoleh informasi awal pengembangan produk. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini meliputi: 1) melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk; 2) bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat; 3) uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak, baik substansi maupun metodologi. Dalam tahap ini peneliti berupaya untuk dapat memformulasikan konsep ke dalam model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif yang aplikatif. Untuk mendapatkan desain produk seperti yang diharapkan, maka pada tahap ini dilakukan penilaian kepada ahli manajemen pendidikan dan ahli pendidikan luar biasa. Tahap uji coba pendahuluan ini, peneliti direncanakan dengan menggunakan teknik Delphi dua putaran dan *Fokus Group*

Discussion (FGD). Subjek yang dipilih dalam tahap uji coba pendahuluan adalah para pakar (dosen dengan dua keahlian di atas), pengawas, kepala sekolah dan guru di sekolah inklusif.

5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas

Langkah ini merupakan proses perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas dan dari berbagai masukan. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Dalam tahap ini peneliti berupaya untuk menyempurnakan hasil atau masukan-masukan yang diperoleh dari lapangan terkait dengan pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Dengan demikian proses revisi yang dilakukan ini, peneliti berupaya untuk menyempurnakan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif dengan harapan saat uji lapangan selanjutnya tidak terlalu banyak masukan lagi karena sudah sesuai dengan harapan dan sangat mungkin untuk diaplikasikan.

6. Main Field Test

Langkah ini merupakan uji produk secara lebih luas. Langkah ini meliputi 1) melakukan uji efektivitas desain produk; 2) uji efektivitas desain, pada umumnya, menggunakan teknik eksperimen model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif; 3) Hasil uji lapangan adalah diperoleh desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Langkah ini dilakukan bila produk sudah dipandang cukup, dan masukan dari tahap sebelumnya telah dilakukan dan disempurnakan. Dalam upaya pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif, maka pihak yang terlibat semakin bertambah dan sedapat mungkin dapat mewakili dari berbagai

kebutuhan dan kepentingan. Pada tahap ini tentunya draft produk pengembangan sudah siap diujicobakan pada skala yang lebih luas.

7. Revisi Hasil Uji Lapangan Lebih Luas

Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang telah dikembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan dengan melakukan banyak meminta masukan dari banyak pihak mulai dari dinas, pengawas, kepala sekolah dan guru di sekolah inklusif. Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif untuk kesempurnaan pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Dalam tahap ini dimungkinkan menghadirkan pakar manajemen pendidikan dan ahli pendidikan anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan untuk mendapatkan masukan dan pematapan konsep. Dengan adanya kegiatan revisi hasil uji lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan semakin menyempurnakan konsep dan hasil pengembangan.

8. Uji Kelayakan

Sebagaimana saran pada umumnya bahwa langkah pada tahap ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar: 1) melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk; 2) uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk; 3) hasil uji lapangan adalah diperoleh model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Sebagai upaya pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif, maka keseriusan dari peneliti sangat dituntut dan dipertaruhkan secara akademik. Dalam tahap ini peneliti harus siap mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang lebih kompleks mengenai pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Pada tahap ini, produk pengembangan berupa buku

pedoman model pengelolaan kelas beserta instrumennya diharapkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

9. Revisi Final Hasil Uji Kelayakan

Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan yaitu pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai “generalisasi” yang dapat diandalkan. Dengan demikian tahap ini dapat dilakukan bila produk tentang pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif sudah dipandang aplikatif digunakan di sekolah.

Produk pengembangan berupa pedoman model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif ini dilakukan revisi berdasarkan masukan dari ahli, pengawas, kepala sekolah maupun guru seperti dalam langkah kedelapan. Hasil revisi merupakan hasil ujicoba terakhir pada langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Dengan demikian produk pengembangan merupakan produk akhir dalam bentuk panduan model dan instrumen pengelolaan kelas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dengan demikian produk pada tahap ini diharapkan sudah dapat diperbanyak dan dapat dilanjutkan pada tahap diseminasi dan implementasi pada tahap akhir penelitian pengembangan. Dengan adanya revisi final ini, maka proses penelitian dan pengembangan tentang model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif telah dirasa cukup.

10. Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir

Tahap ini membutuhkan komitmen dari si-peneliti dan kebijakan dari dinas, pengawas sekolah, dan kepala sekolah dalam pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Desiminasi dan implementasi tentang pengembangan model

pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif diupayakan untuk dapat dilakukan, sehingga akan lebih memiliki nilai kebermanfaatan. Ada beberapa cara dalam melakukan tahap ini seperti melakukan laporan hasil dari penelitian dan pengembangan dalam forum-forum akademik tentang pengelolaan kelas inklusif. Dalam proses desiminasi dan implementasi sebagai bentuk distribusi produk setelah melalui *quality control*, ini keberlanjutannya di lapangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah, dan semestinya ini juga akan disesuaikan adanya perubahan dan penerapan kurikulum 2013.

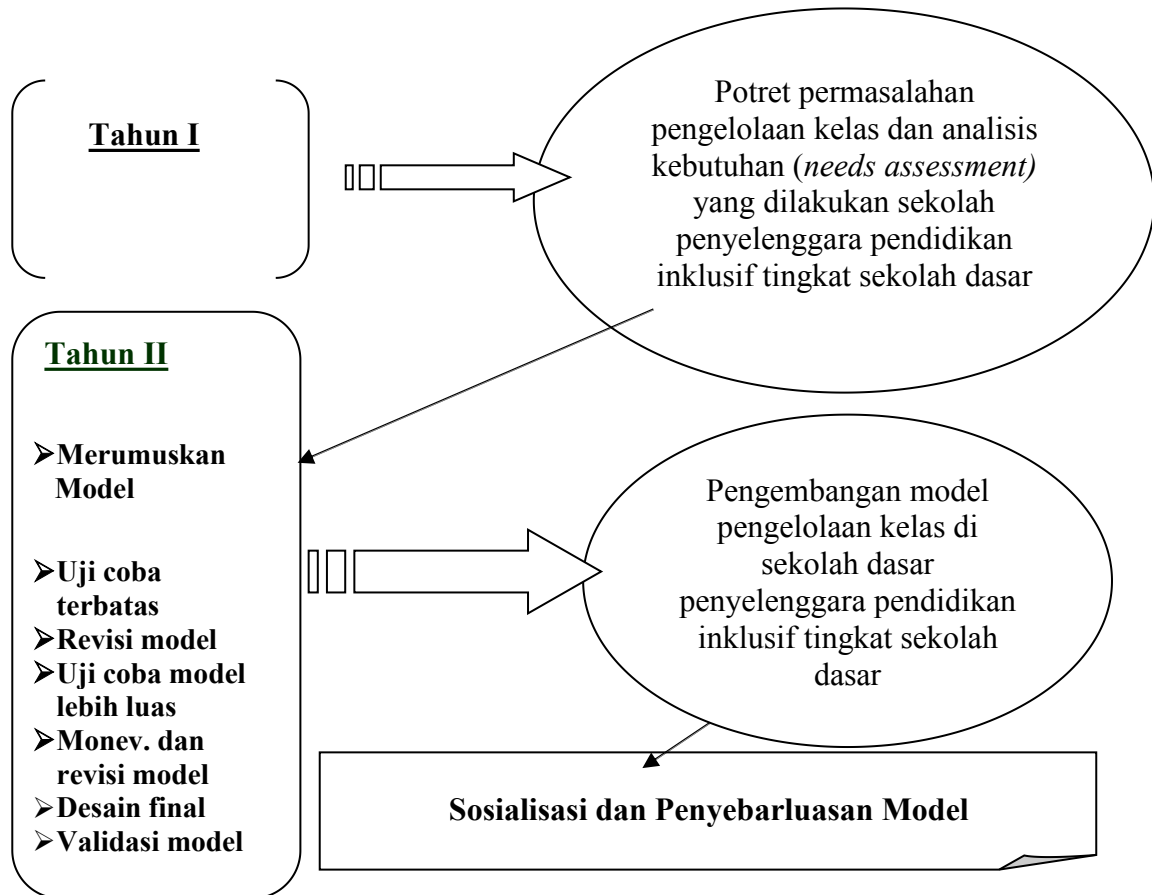
C. Uji Coba Produk

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian tujuan penelitian pengembangan bahwa produk yang akan dihasilkan adalah pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif yang berupa panduan pengelolaan kelas inklusif. Untuk itu rancangan uji coba produk tentang pengelolaan kelas inklusif tersebut dapat diuraikan berdasarkan desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagai berikut.

1. Desain Uji Coba

Uji coba adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pengembangan, kegiatan ini sebagaimana upaya untuk mendapatkan produk berkualitas dan diharapkan. Untuk itu desain uji coba perlu dirancang dan dilakukan secara jelas. Desain uji coba terhadap produk yang akan dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan adalah model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif, langkah uji coba meliputi: validasi ahli terhadap model yang dikembangkan kepada ahli yang memiliki sesuai dengan kepakarannya & pengalamannya dalam pengelolaan kelas inklusif, uji coba lapangan skala kecil terhadap model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif dengan teknik area proporsional random sampling, dan selanjutnya pelaksanaan tindakan. Dalam desain uji coba ini tentunya harus dapat mewakili temuan dan model-model pengelolaan kelas

inklusif sebagaimana konsep yang dikembangkan, setelah itu baru ujicoba skala besar. Adapun desain uji coba yang akan dilakukan dalam penelitian dan pengembangan mengikuti desain ujicoba yang ada, adapun untuk tahap satu menekankan pada rancangan berikut.



2. Subjek Coba

Subjek coba memiliki peran yang sangat besar untuk keberhasilan penelitian pengembangan. Dalam menentukan subjek coba tentu saja harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan harus memenuhi persyaratan metodologi penelitian pengembangan. Subjek uji coba dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik sampling bertujuan atau *purposive sampling* dan mempunyai karakteristik yang sesuai dengan pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Subjek uji coba untuk menghasilkan produk melalui penelitian dan pengembangan ini adalah para pelaku

pembinaan kemahasiswaan untuk mendapatkan konsep yang tepat. Subjek coba dalam tahap penelitian ini mengacu pada Borg and Gall (2007) yang meliputi ujicoba pendahuluan, ujicoba utama, dan uji operasional, dengan jumlah subjek coba yang berbeda-beda jumlahnya. Subjek coba dalam pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif adalah guru-guru yang mengampu di kelas inklusif.

3. Jenis Data

Data sangat penting dalam proses penelitian dan menjadi dasar dalam pengembangan produk. Dari data yang ada maka pengembangan dilakukan dan disempurnakan. Jenis data dapat berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif, data primer atau data skunder. Jenis data dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk berupa model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif yang berupa model pengelolaan kelas berbasis pendekatan akademik lebih banyak berupa data yang sifatnya kualitatif, yaitu masukan atau komentar dari subjek coba. Sebagaimana produk yang diharapkan dapat berkualitas dan dapat diterapkan dalam proses penelitian, maka jenis data yang dikumpulkan sebagai proses pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif adalah:

- a. Data tentang unsur atau komponen yang diperlukan dalam pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif berbasis pendekatan akademik.
- b. Data tentang tingkat kegunaan atau aplikatif, tingkat kemudahan penggunaan, tingkat kelengkapan, dan tingkat keterbacaan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif.
- c. Data tingkat keberterimaan dari guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan selaku pengguna produk yang telah dikembangkan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan tersebut maka digunakan 1) teknik Delphi untuk menjaring pendapat para pakar dan praktisi guna memberikan *judgment* dan

memperoleh kesepakatan tentang model pengelolaan kelas inklusif. 2) *Focus Group Discussion* (FGD) diperlukan untuk memberikan penilaian dan *judgment* mengenai draft pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif, sedangkan angket digunakan untuk memperoleh validitas dan reliabilitas, kelayakan di lapangan. Adapun instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai pendukung perolehan data penelitian.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam kegiatan ini, tentu saja ada dua instrumen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dimana dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga instrumennya pun disesuaikan dengan pendekatan kualitatif, dan juga instrumen yang berkaitan dengan pengembangan produk. Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah pedoman wawancara untuk mengetahui model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif yang diharapkan. Pengembangan instrumen dan kisi-kisi yang ada disesuaikan dengan tujuan penelitian. Instrumen yang dikembangkan dalam pengumpulan data ini meliputi: pedoman wawancara, dan pedoman observasi.

Semua instrumen dikembangkan dengan cara mengikuti langkah-langkah dan kaidah dalam penyusunan instrumen pengumpulan data. Dengan demikian instrumen pengumpul data ini diharapkan betul-betul dapat menjadi alat pengumpul data. Adapun instrumen yang berhubungan dengan pengembangan produk disesuaikan dengan produk pengembangan kemahasiswaan dan kaidah pengembangan itu sendiri. Instrumen pengumpulan data terutama berupa pedoman wawancara berisi antara lain berisi identitas subjek yang diwawancarai. Selanjutnya berupa kisi-kisi pertanyaan yang meliputi instrumen yang berupa daftar pertanyaan dan observasi yang sifatnya rambu-rambu

sehingga diakhir instrumen, pengembang memberikan kesempatan kepada subjek coba untuk memberikan masukan tertulis.

5. Teknik Analisis Data

Data merupakan deskripsi dari pernyataan-pernyataan seseorang tentang perspektif, pengalaman atau sesuatu hal, sikap, keyakinan dan pikirannya, serta petikan-petikan isi dokumen-dokumen berkait dengan suatu program (Patton, 1980). Analisis data adalah komponen penting yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Dengan analisis data yang benar dan tepat maka akan diperoleh informasi yang akurat pula sebagai pijakan dalam pengembangan ataupun penyempurnaan pengembangan. Teknik analisis data adalah proses sistematis pencarian, penyusunan dan penyederhanaan data yang berupa transkrip wawancara, sebagai sumber data maupun catatan lapangan yang berupa hasil diskusi tentang pengelolaan kelas, dan materi lainnya yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman dan memungkinkan seseorang menyajikan apa-apa yang telah ditemukannya kepada orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan mengolah data yang telah diperoleh baik berupa angket, wawancara, observasi, maupun dari dokumentasi. Dengan demikian triangulasi dalam analisis data tentang pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan sebagai proses penyederhanaan dan sekaligus pemaknaan data. Triangulasi yang dilakukan dalam analisis data ini terutama didasarkan pada triangulasi berdasarkan sumber data atau metode pengumpulan data. Adapun hasil akhir dari triangulasi adalah menjadi data penelitian yang selanjutnya akan menjadi data yang mendapatkan pembahasan dan pengembangan selanjutnya. Teknik analisis data deskriptif digunakan untuk menganalisis data validasi ahli terhadap tingkat kegunaan, kemudahan, kelengkapan, dan tingkat keterbacaan pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif.

Analisis deskriptif digunakan dalam analisis hasil validasi atau penilaian dari para ahli, praktisi dan pemakai produk. Analisis dilakukan terhadap konstruk pengembangan, kelengkapan sebagaimana di atas. Untuk memudahkan analisis maka persentase digunakan dalam analisis ini, misalnya berapa yang setuju, dan sebagainya. Untuk menggambarkan hasil distribusi data masing-masing konstruk dilakukan dengan menggunakan histogram. Persentase digunakan terutama dalam teknik Delphi yaitu menilai tingkat pentingnya konsep pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu persentase juga dimungkinkan digunakan untuk menilai kelayakan pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif dan indikator yang dikembangkan.

Sejak pengumpulan data hingga pengambilan kesimpulan tentu saja dilakukan proses pengecekan keabsahan data. Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Informasi yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti dan akan dijadikan data dalam penelitian ini perlu diperiksa kredibilitasnya, sehingga data penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik simpulan. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utamanya maka uji validitas dan reliabilitas instrumen ini bukan dengan cara mengujicobakan instrumen, melainkan melalui pemeriksaan kredibilitas dan pengauditan datanya. Untuk mengecek atau memeriksa keabsahan data mengenai model pengelolaan kelas inklusif berdasarkan data yang telah terkumpul, dilakukan dengan kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas.

Dengan kata lain teknik analisis data adalah penyederhanaan data agar lebih mudah disajikan dan dipahami. Dengan demikian data yang disederhanakan dan ingin dipaparkan adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan kelas inklusif. Dalam analisis dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat

dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan diputuskan peneliti untuk dilaporkan secara sistematis (Bogdan & Biklen, 1982). Data dalam penelitian terdiri atas deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku dalam penelitian ini tentu saja yang berhubungan dengan model pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini terutama untuk data yang berupa kata-kata. Analisis deskriptif kualitatif tersebut merupakan rekonstruksi dari konstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut maka analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan meliputi proses reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan sebagaimana yang disarankan Milles dan Huberman (1992) yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) kesimpulan (kesimpulan sementara, verifikasi, dan kesimpulan akhir). Ketiga alur analisis data tersebut merupakan suatu kesatuan, prosesnya saling berkaitan dan berulang-ulang selama dan sesudah pengumpulan data. Adapun untuk analisis data yang berupa angka-angka bila memungkinkan akan dilakukan secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis menggunakan rumus statistik.

a. Reduksi data

Dalam proses analisis data, reduksi data adalah langkah pertama yang sangat penting. Melalui reduksi data yang benar maka akan dimungkinkan disaringnya data yang memang menjadi fokus penelitian. Untuk itu reduksi data dalam penelitian harus dilakukan dengan cara melakukan seleksi ketat, membuat ringkasan data dan rangkuman inti data. Reduksi dapat dilakukan secara terus menerus ketika proses pengumpulan data

berlangsung. Selanjutnya dari hasil reduksi data kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan sementara. Jika ditemukan ketidakcocokan antara data, maka perlu dilakukan pelacakan kembali untuk menemukan data yang valid. Jika data benar-benar telah meyakinkan, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sementara. Reduksi data dari hasil wawancara ataupun observasi bahkan dokumentasi perlu dilakukan dengan memperhatikan fokus, sebab sangat mungkin tanpa adanya fokus yang jelas arah penelitian menjadi berubah.

Secara umum proses analisis data dimulai sejak peneliti memasuki latar penelitian dengan cara menelaah setiap data yang dikumpulkan, baik data yang diperoleh melalui observasi partisipatif dalam bentuk catatan lapangan, wawancara mendalam yang sudah ditranskripsikan dalam bentuk ketikan, dokumen resmi, hasil perbincangan informal dan foto. Semua data yang sudah dikumpulkan itu dibaca, dipelajari dan ditelaah secara hati-hati dan mendalam. Selanjutnya data tersebut direduksi dengan cara melakukan abstraksi yang berisi rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada dalam konteksnya serta mempunyai pengertian yang jelas. Reduksi data merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data lapangan ke dalam format yang telah disiapkan baik format catatan lapangan, hasil observasi, hasil wawancara dan format hasil studi dokumentasi. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan atas dasar fokus penelitian dan berdasarkan perkembangan hasil wawancara maupun observasi dan dokumentasi yang diperoleh. Dengan demikian data yang tidak diperlukan yang berkaitan dengan pengelolaan kelas inklusif diabaikan.

b. Penyajian Data

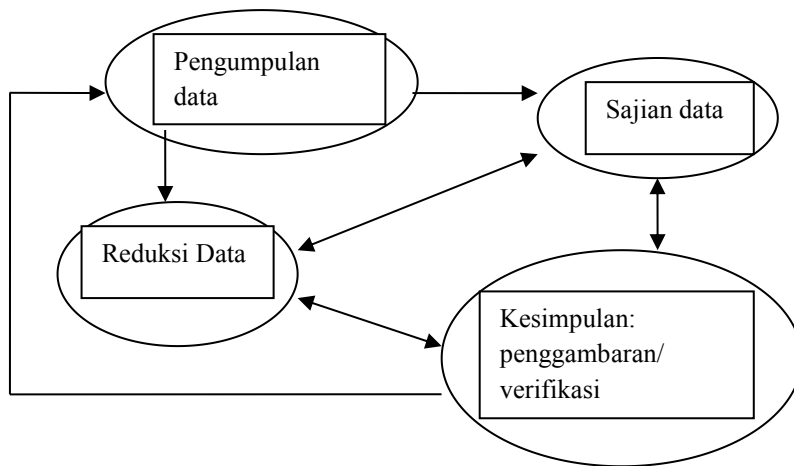
Penyajian data merupakan tahap kelanjutan dari hasil reduksi data tentang pembinaan mahasiswa baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Penyajian data adalah suatu cara untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis

setelah dianalisis ke dalam format yang telah disiapkan sebelumnya. Namun data yang disajikan ini masih dalam bentuk sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat hingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika data yang disajikan telah teruji kebenarannya dan telah sesuai, maka dapat dilanjutkan pada tahap penarikan kesimpulan-kesimpulan sementara. Namun jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik kesimpulan, melainkan dilakukan reduksi kembali bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menjangar data baru.

c. Kesimpulan (temuan sementara, verifikasi dan kesimpulan akhir)

Wawancara, observasi maupun untuk mendapatkan dokumen tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu satu kali. Untuk itu sebagaimana kelaziman dalam pendekatan kualitatif, maka proses pengumpulan data membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun demikian sejak awal proses pengumpulan data di lapangan peneliti memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Pada saat peneliti memberi arti atau memakai data-data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi berarti peneliti telah menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut masih bersifat sementara, kesimpulan sementara disempurnakan melalui verifikasi. Verifikasi dilakukan melalui teknik pengecekan keabsahan temuan penelitian. Selanjutnya dirumuskan temuan-temuan yang merupakan hasil penelitian. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data ini merupakan proses siklus yang interaktif.

Adapun proses pengumpulan data, reduksi data hingga penarikan kesimpulan dapat digambarkan seperti berikut ini.



Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif (Milles & Huberman, 1992)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada umumnya bab empat dalam penelitian pengembangan adalah menyajikan data hasil uji coba yang didasari dari hasil penelitian pendahuluan. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data tentang hasil uji coba yang telah dilakukan dan mendapatkan berbagai masukan. Langkah selanjutnya dalam bab empat adalah revisi produk sebagai bagian akhir dari proses pengembangan. Namun dalam penelitian ini, dalam bab empat baru berupaya memaparkan hasil penelitian sebagaimana yang menjadi tujuan pada tahap atau tahun pertama. Dengan adanya tahapan yang jelas dan tertata diharapkan akan mendapatkan hasil pengembangan yang lebih baik dan dapat diterapkan karena sesuai dengan kebutuhan di lapangan khususnya di SD inklusif.

Tujuan akhir dari penelitian pengembangan yang dilakukan ini adalah tersusunnya produk yang berupa model pengelolaan kelas di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif. Sebagaimana tujuan pada tahun pertama bahwa pada tahun perama penelitian ini ditargetkan untuk dapat: 1) meridentifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. 2) Diperolehnya potret pengelolaan kelas yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar untuk di Provinsi DI Yogyakarta. 3) Tersusunnya analisis kebutuhan (*needs assessment*) sekolah dalam pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. dan 4) Terlaksananya proses pengembangan kerangka (*draft*) buku model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013, berdasarkan data yang tercatat di dinas pendidikan provinsi

ada 153 sekolah baik pada jenjang taman kanak-kanak, SD, maupun sekolah menengah. Dari jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tersebut paling banyak berada pada jenjang SD yaitu: 128 sekolah, dengan rincian 9 sekolah di Kota Yogyakarta, 33 sekolah di Kabupaten Bantul, 38 sekolah di Kabupaten Gunung Kidul, 22 sekolah di Kabupaten Kulon Progo, dan 26 sekolah di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di DIY mengalami peningkatan. Sekolah inklusif pada tahun 2011 baru tercatat 115 sekolah, dan 82 buah ada di jenjang SD.

Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di DIY dimungkinkan akan bertambah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat maupun DIY sejalan misi dengan *educational for all*. Sebagaimana di Gunung Kidul akhir-akhir ini juga memberikan kesempatan lebih kepada 300 sekolah agar memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus untuk diterima di sekolah reguler. Selain itu juga telah dideklarasikan bahwa Gunung Kidul termasuk kabupaten inklusif. Perkembangan lainnya juga terjadi di Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan juga Kota Yogyakarta. Dengan demikian secara fakta sekolah iklusif yang ada di Provinsi DIY akan lebih banyak dari yang terdaftar secara resmi pada dinas pendidikan provinsi. Fakta ini harus diikuti dengan dukungan yang dapat membantu ketercapaian program pendidikan inklusif yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Begitu banyak jumlah dan perkembangan sekolah inklusif di Provinsi DIY baik yang baru membuka dan melaksanakan kelas inklusif ataupun yang sudah lama menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik yang terdata secara resmi ataupun yang dibangun atas kesadaran dan usulan sekolah, baik yang telah memiliki guru pembimbing khusus ataupun belum, semua itu tentu memiliki motivasi dan semangat yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam proses pengumpulan data penelitian maka responden sedapat mungkin dapat mewakili dari kelima kabupaten kota yang ada di DIY, disamping itu ada

tidak adanya GPK, dan sebagainya. Adapun untuk sekolah yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut.

Kabupaten/ Kota	Sekolah	Kepala Sekolah	Alamat Sekolah
Gunung Kidul	SDN Siyono 1	Umi Fitriah, S.Pd.	Glidag, Logandeng, Playen
	SDN Karangmojo I	Sukiran, S.Pd.	Karangmojo 1, Karangmojo
	SDN Karangmojo III	Achmadi, S.Pd, M.A.	Plumbungan, Gedangrejo, Karangmojo
	SDN Playen IV	Suharta, S.Pd.	Playen 2, Playen
	SDN Ngeposari II	Romdloni, S.Pd. SD	Mojo, Ngeposari, Semanu
Kulon Progo	SDN I Giripurwo	Rusmiyati, S.Pd	Nglengkong, Giripurwo
	SDN II Giripurwo	Drs. Tugiman	Karanganyar, Giripurwo
	SDN Pergiwatu	Umi Zahro, S.Pd	Panjul, Srikayangan
	SDN Gadingan	Ngadino, S.Pd.	Durungan, Wates
	SDN III Brosot	Srigiyanti, S.Pd.	Pulo, Brosot, Galur
	SDN Butuh	Drs. Sunardi	Pereng, Bumirejo
Bantul	SDN Kadipiro	Sumaryatun, S.Pd.	Sutopadan, Kasihan
	SDN 2 Wijirejo	Widyastuti, S.Pd.	Gesikan, Wijirejo
	SDN I Jambitan	Bambang. Siswanto, S.Pd.	Kepanjen, Jambidan, Bangun Tapan
	SD Kepuhan	Sani, S.Pd.	Kepuhan, Timbulharjo
	SD Jolosutro	Sunarni, S.Pd.	Jolosutro, Piyungan
Yogyakarta	SDN Tamansari	Dwi Atmini, S.Pd	Jl. Kaptan Tendean 43 Yk
	SD Taman muda	A.Riatriasih,M.Pd	Jl. Tamansiswa 25 Yk
	SD Karanganyar	Murwani RG. S.Pd.	Jl. Singingangaraja 29A
	SD Tumbuh	C. Astriani	Jl. AM. Sangaji 48 Yogya
Sleman	SDN Balecatur I	Suranti, S.Pd, SD	Gejawan, Balecatur
	SDN Gejayan	Bambang P, S.Pd.	Condongcatur Depok
	SD Pojok	Tukirah	Pojok, Sinduadi, Mlati
	SD Budimulia Dua	Aini Husna	Seturan, Depok, Sleman
	SDN Semarangan 5	Rewulu, Sidokarto	Sugita, S.Pd.

Daftar di atas adalah responden yang menjadi sumber informasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di DIY, sekolah tersebut hanyalah bagaian kecil dari sekolah dasar yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebagaimana data yang diperoleh dari guru ataupun kepala sekolah yang menjadi responden awal dalam pengumpulan data di

atas yaitu guru-guru sekolah dasar yang mengampu di kelas inklusif dan juga kepala sekolah dasar inklusif. Data informasi yang dikumpulkan tentu dikaitkan dengan fokus atau permasalahan yang diteliti yaitu: permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif, potret penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan analisis kebutuhan dalam pengelolaan kelas inklusif, serta kerangka buku model pengelolaan kelas inklusif. Jawaban tentang empat fokus merupakan dasar dalam upaya menyusun model pengelolaan kelas inklusif.

Untuk menyusun model pengelolaan kelas inklusif tentu harus didasarkan pada fakta pelaksanaan yang ada di sekolah, disamping di dasarkan atas teori-teori pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif. Untuk itu hasil penelitian ini tentunya akan sangat mendasari dalam penyusunan model pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar yang akan dikembangkan. Dengan demikian data lapangan tentang permasalahan yang dihadapi guru adalah hal-hal umum yang terkait dengan kondisi dan permasalahan dukungan kebijakan. Sebagaimana data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, maupun angket tentang permasalahan pengelolaan kelas inklusif maka dapat disajikan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah dalam pengelolaan kelas inklusif

Banyak cerita yang terjadi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Masing-masing sekolah melakukan atas dasar pengalaman, keberterimaan dan juga niat awal membuka dan menyelenggarakan kelas inklusif. Fokus pertama dari tujuan penelitian ini adalah diperolehnya identifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan kelas inklusif. Berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan kelas inklusif cukup banyak. Identifikasi masalah yang terkumpul baik yang berkaitan dengan pemahaman guru tentang anak berkebutuhan khusus, sampai dengan keterampilan menyiapkan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Permasalahan yang dialami sekolah adalah seringnya ditemukan adanya kasus-kasus yang tidak diduga sebelumnya seperti perilaku tantrum, hiperaktif atau yang sangat khusus sehingga harus melibatkan pihak lain. Permasalahan yang juga menjadi kendala bagi sekolah adalah berkaitan dengan pemenuhan materi pembelajaran atau penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah atau siswa yang berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus ada yang menyelenggarakan secara penuh di kelas reguler, di antara kelas reguler dan di kelas khusus, atau bahkan ada juga yang menyelenggarakan layanan siswa berkebutuhan khusus di kelas khusus tetapi tempatnya di sekolah reguler. Kondisi tersebut sangat bergantung dari wawasan, kebijakan dan keberterimaan semua pihak di sekolah.

Adapun hasil identifikasi masalah yang terkumpul dapat disajikan berikut.

- a) Guru belum memiliki pengetahuan melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus,
- b) Guru belum dapat melakukan pembuatan program pembelajaran individual,
- c) Guru belum dapat membuat perencanaan pembelajaran yg berdiferensiasi,
- d) Guru belum memiliki strategi pembelajaran untuk siswa yang heterogen,
- e) Guru belum menyiapkan media, metode, dan evaluasi yang sesuai untuk mengakomodasi semua siswa,
- f) Banyak siswa yang memberikan stigma negatif pada ABK,
- g) Keterbatasan fasilitas sekolah untuk semua siswa.

2. Potret pengelolaan kelas inklusif tingkat sekolah dasar

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa data yang terkumpul baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi tentang pengelolaan kelas inklusif akan menjadi dasar dalam pengembangan yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini tentang pelaksanaan pengelolaan kelas inklusif tingkat sekolah dasar yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing melakukan dengan mencari bentuk versi sekolah masing-

masing. Seperti di SD Tumbuh Yogyakarta misalnya, pengelolaan untuk kelas inklusif dilakukan dengan adanya bantuan guru pembimbing khusus untuk mendampingi setiap siswa yang dikategorikan berkebutuhan khusus. Tetapi sangat berbeda dengan SD yang ada di Mendongan Playen, dimana ditemukan adanya sejumlah siswa yang dicurigai ABK dan belum diasesmen. Tenaga pendidik yang belum terlatih untuk menangani ABK yang jumlahnya 11 anak dengan rincian 10 anak lambat belajar dan 1 anak tuna grahita. Selain itu siswa ABK selalu tertinggal prestasinya dgn siswa umum, dengan alasan tidak ada guru GPK, dan sebagainya.

Hasil wawancara di SD Negeri Butuh Lendah Kulon Progo juga menunjukkan kondisi pelaksanaan pengelolaan kelas inklusif yang berbeda pula. Bagaimana dikemukakan Ibu Suparti bahwa dalam merencanakan pembelajaran dilakukans ecara bersama-sama untuk anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan indikator yang sama. Siswa berkebutuhan khusus kadang dibimbing oleh GPK tetapi kadang dilakukan pembelajaran secara bersama tetapi juga kadang-kadang dilakukan pembelajaran dengan tugas dan materi tersendiri. Adapun potret pengelolaan kelas inklusif secara umum dari sekolah yang disurvei atau diwawancara dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a) Sekolah rata-rata melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2002/2003,
- b) RPP dibuat seperti biasa, pelaksanaannya ada sedikit penyesuaian untuk ABK,
- c) Siswa berkebutuhan khusus belum mendapatkan perhatian optimal,
- d) Siswa berkebutuhan khusus masih sering diejek atau diabaikan oleh teman sekelas,
- e) Guru melakukan pembelajaran atas pengalaman dan mencoba-coba di kelas,
- f) Guru belum menyiapkan strategi, media, metode yang bervariasi.

3. Analisis kebutuhan (*needs assessment*) sekolah dalam pengelolaan kelas inklusif

Analisis kebutuhan adalah bagian penting dan langkah yang harus dilakukan dalam proses pengembangan. Analisis kebutuhan yang diperoleh dalam penelitian ini

dikumpulkan baik melalui wawancara, lembar isian, atau hasil observasi di sekolah. Berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilakukan, hampir sebagian besar guru yang mengampu kelas inklusif membutuhkan adanya pemahaman tentang anak-anak berkebutuhan khusus, cara melakukan identifikasi, cara memperlakukan anak berkebutuhan khusus di kelas observasi dan kelas transisi. Selain itu kebutuhan akan berbagai contoh penyelenggaraan pengelolaan kelas inklusif sangat diperlukan guru. Hal ini didasari karena hampir sebagian besar guru tidak dibekali dengan pengenalan anak berkebutuhan khusus termasuk strategi pembelajaran yang harus dilakukannya. Adapun secara garis besar kebutuhan yang diharapkan sekolah terutama guru adalah:

- a) Sekolah membutuhkan dukungan dan fasilitas secara nyata,
- b) Guru membutuhkan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus & cara mengidentifikasinya,
- c) Guru membutuhkan pemahaman tentang kelas observasi dan kelas transisi,
- d) Guru membutuhkan pelatihan tentang model pengelolaan kelas inklusif,
- e) Guru membutuhkan pelatihan tentang strategi pembelajaran, teknik kerjasama, melibatkan teman di kelas inklusif,
- f) Guru membutuhkan bacaan atau referensi tentang model pengelolaan kelas inklusif,
- g) Guru membutuhkan cara membuat program pembelajaran individual & aplikasinya.
- h) Guru sangat membutuhkan cara penilaian yang adil untuk siswanya di kelas.

Berdasarkan fakta atau temuan yang diperoleh di lapangan bahwa sebagian besar guru tidak atau belum memiliki bekal tentang pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Guru-guru sangat mengharapkan adanya contoh dan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan dalam pengelolaan kelas inklusif. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah mencoba merumuskan kebutuhan tersebut dalam draft modul atau panduan tentang pengelolaan kelas inklusif. Dengan demikian untuk mengembangkan

modul, peneliti juga meminta pendapat dari responden dalam hal ini guru tentang modul yang diperlukan dan tampilannya baik ukuran buku, isi, bahkan sampai jenis huruf dan besarnya huruf. Dari masukan tersebut, peneliti melakukan draft modul yang berisi sebagai berikut. Mengenalkan model kelas inklusif yang memungkinkan dilakukan dengan melihat kondisi di Yogyakarta yang telah memiliki kebijakan tentang pendidikan inklusif.

Dalam draft modul berisi enam model kelas yaitu: kelas reguler (inklusif penuh), kelas reguler dengan *cluster*, kelas reguler dengan *pull out*, kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, dan kelas khusus penuh. Adapun untuk masing-masing model akan dikembangkan tentang perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran kelas inklusif. Untuk pelaksanaan pembelajaran inklusif meliputi: strategi pembelajaran kelompok dan individual, mengembangkan standar perilaku kelas, menciptakan komunikasi dan kerjasama kooperatif, pendekatan kelompok dalam meningkatkan motivasi, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan pengelolaan perilaku bermasalah. Namun demikian karena pelaksanaan penelitian ini baru pada tahun pertama dan sebagaimana tujuan dalam tahun pertama pelaksanaan penelitian ini dapat dikatakan telah selesai.

BAB V

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Penelitian pada tahun pertama adalah proses perolehan data sebagai dasar untuk melakukan pengembangan. Dengan demikian akan kurang bermakna bila penelitian yang telah dilakukan pada tahun pertama ini tidak dilakukan tindak lanjut. Oleh karena itu sesungguhnya pada tahun kedua adalah pelaksanaan pada langkah keempat sampai sepuluh dalam tahap penelitian dan pengembangan. Pada bab ini akan diuraikan tentang tidak lanjut dari hasil penelitian tahap pertama sebagai *base line* untuk pengembangan. Untuk itu rencana pada tahap berikutnya adalah melanjutkan langkah-langkah pengembangan yang telah dilakukan dengan adanya penelitian terlebih dahulu.

Sebagaimana tujuan yang akan dididapai pada tahun kedua dalam penelitian pengembangan yang dilakukan ini yaitu: 1) Terlaksananya pemantapan *draft* buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. 2) Tersusunnya buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. 3) Terlaksananya ujicoba buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. 4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi ujicoba, yang hasilnya digunakan untuk merevisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. 5) Terlaksananya revisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. 6) Terlaksananya desiminasi hasil penelitian dan terumuskannya rekomendasi kebijakan terkait dengan buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari berbagai masalah yang ditemukan selama proses penelitian tersebut setidaknya sangat dipengaruhi oleh niat awal dalam membuka sekolah atau kelas inklusif. Secara fakta masih ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif karena adanya bantuan, menyelenggarakan sekolah inklusif karena tunjukkan dari dinas, dan menyelenggarakan karena kesadaran penuh. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi realitas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun demikian di sekolah juga ada yang memberikan layanan untuk siswa berkebutuhan khusus secara sungguh-sungguh, ada juga yang sekedar memasukkan data siswa di kelas tetapi intervensi belum dilakukan secara maksimal, dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka tujuan yang diharapkan pada tahun pertama penelitian telah tercapai yaitu: 1) teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, 2) diperoleh potret pengelolaan kelas inklusif tingkat sekolah dasar, 3) tersusun analisis kebutuhan sekolah dalam pengelolaan kelas inklusif tingkat sekolah dasar. Berdasarkan tujuan yang telah diperoleh dari nomor satu hingga tiga maka tujuan yang keempat dari tahun pertama penelitian maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengembangan kerangka (*draft*) buku model pengelolaan kelas inklusif tingkat sekolah dasar. Dengan demikian langkah selanjutnya adalah menyiapkan pencapaian tujuan pada tahun kedua penelitian tentang pengembangan model pengelolaan kelas inklusif.

B. Saran

Agar hasil penelitian dan pengembangan tentang model pengelolaan kelas ini lebih bermakna maka, draf yang telah ada harus dikonsultasikan dan dimintakan masukan kepada

banyak pihak. Demikian juga hasil-hasil temuan yang berkaitan dengan penelitian dapat dijadikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini masih sangat banyak data yang belum diolah secara maksimal, untuk itu bagi tim peneliti perlu melakukan pengolahan lebih lanjut tentang data-data yang terkumpul. Data yang ada tentang masalah, potret dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif begitu bervariasi, maka sudah seharusnya model pengelolaan kelas yang menjadi tujuan akhir dalam penelitian pengembangan ini sudah seharusnya untuk diwujudkan dan harus melibatkan masukan dari banyak pihak yang memahami tentang pengelolaan kelas dan pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Denis & Ny. Enrica dengan editor Mohammad Sugiarmun & MIF Baihaqi. (2006). *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa (terjemahan *Inclusion, School for All Student*. Karya J. David Smith. 1998).
- Hermanto, (2010) *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Khusus.
- Hermanto, (2010). *Kemampuan Guru dalam Melakukan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Laporan Penelitian.
- James Levin & James F. Nolan. (1996). *Principles of Classroom Management*. USA: by Allyn & Bacon.
- Jones, Vern and Jones Louise. (2012). *Manajemen Kelas Komprehensif* (terjemahan). Jakarta: Kencana Prenada
- Lampiran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang *Standar Isi*. Jakarta: Depdiknas.
- Suharsimi Arikunto. (1993). *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparno, Heri Purwanto, Edi Purwanto. (2007). *Modul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Konsorsium PJJ PGSD UT.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2009). *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Depdiknas.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Gambar 1. Suasana SD Giwangan sebagai Salah Satu SD Inklusif.



Gambar 2. Peneliti Melakukan Wawancara Pengambilan Data di SD Giwangan.



Gambar 3. Anggota Peneliti Melakukan Pengambilan Data secara Kolektif.



Gambar 4. Suasana dan Proses Pengambilan Data secara Kolektif di Lab. PLB.



Gambar 5. Suasana Diskusi Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Kelas di Lab. PLB.



Gambar 6. Salah Satu Bentuk Layanan Pendidikan Inklusif Di Gunung Kidul.

Lampiran: Rancangan Model Pengelolaan Kelas

MODEL PENGELOLAAN KELAS INKLUSIF

Pengelolaan kelas sangat dipengaruhi oleh konsep dan kesadaran dalam mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di kelas dan di sekitar sekolah. Tujuan pengelolaan kelas adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Dalam kelas inklusif perhatian, dorongan dalam pengembangan potensi tidak hanya untuk siswa yang dikatakan normal tetapi juga bagi individu berkebutuhan khusus. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangan dalam pengelolaan kelas inklusif.

Dalam melakukan pengelolaan kelas inklusif harus memperhatikan jumlah siswa dalam rombongan belajar, ada berapa jumlah siswa berkebutuhan khusus, keragaman jenis kebutuhan khusus, dan seiring dengan tuntutan pembelajaran tematik integratif seperti yang ditekankan dalam kurikulum 2013, dan dengan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan maka dalam model pengelolaan kelas ini perlu mempertimbangkan pula tentang bentuk atau model kelas inklusif yang akan dilakukan, disamping kesungguhan dukungan dan kesiapan sekolah.

A. Model Kelas Reguler (Inklusif Penuh)

1. Perencanaan pembelajaran
2. Pelaksanaan pembelajaran
 - a. Strategi pembelajaran kelompok dan individual
 - b. Mengembangkan standar perilaku kelas
 - c. Menciptakan komunikasi dan kerjasama kooperatif

- d. Pendekatan kelompok dalam meningkatkan motivasi
- e. Penggunaan metode dan media pembelajaran
- f. Pengelolaan perilaku bermasalah

B. Model Kelas Reguler dengan *Cluster*

- 1. Perencanaan pembelajaran
- 2. Pelaksanaan pembelajaran
 - a. Strategi pembelajaran kelompok dan individual
 - b. Mengembangkan standar perilaku kelas
 - c. Menciptakan komunikasi dan kerjasama kooperatif
 - d. Pendekatan kelompok dalam meningkatkan motivasi
 - e. Penggunaan metode dan media pembelajaran
 - f. Pengelolaan perilaku bermasalah

C. Model Kelas Reguler dengan *Pull Out*

- 1. Perencanaan pembelajaran
- 2. Pelaksanaan pembelajaran
 - a. Strategi pembelajaran kelompok dan individual
 - b. Mengembangkan standar perilaku kelas
 - c. Menciptakan komunikasi dan kerjasama kooperatif
 - d. Pendekatan kelompok dalam meningkatkan motivasi
 - e. Penggunaan metode dan media pembelajaran
 - f. Pengelolaan perilaku bermasalah

D. Model Kelas Reguler dengan *Cluster* dan *Pull Out*

- 1. Perencanaan pembelajaran
- 2. Pelaksanaan pembelajaran
 - a. Strategi pembelajaran kelompok dan individual
 - b. Mengembangkan standar perilaku kelas
 - c. Menciptakan komunikasi dan kerjasama kooperatif
 - d. Pendekatan kelompok dalam meningkatkan motivasi
 - e. Penggunaan metode dan media pembelajaran

- f. Pengelolaan perilaku bermasalah

E. Model Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian

1. Perencanaan pembelajaran
2. Pelaksanaan pembelajaran
 - a. Strategi pembelajaran kelompok dan individual
 - b. Mengembangkan standar perilaku kelas
 - c. Menciptakan komunikasi dan kerjasama kooperatif
 - d. Pendekatan kelompok dalam meningkatkan motivasi
 - e. Penggunaan metode dan media pembelajaran
 - f. Pengelolaan perilaku bermasalah

F. Model Kelas Khusus Penuh

1. Perencanaan pembelajaran
2. Pelaksanaan pembelajaran
 - a. Strategi pembelajaran kelompok dan individual
 - b. Mengembangkan standar perilaku kelas
 - c. Menciptakan komunikasi dan kerjasama kooperatif
 - d. Pendekatan kelompok dalam meningkatkan motivasi
 - e. Penggunaan metode dan media pembelajaran
 - f. Pengelolaan perilaku bermasalah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281.
Telp. (0274) 550839 Fax, (0274) 518617. e-mail: lppm.uny@gmail.com

SURAT PERJANJIAN INTERNAL
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
Nomor : 32/HB-Multitahun/UN 34.21/2013

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Anik Ghufron. : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hermanto, M.Pd : Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Hibah Bersaing , yang beralamat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Internal ini berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 975/A3/3/KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 09/DIKTI/Kep/2011, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 35/DIKTI/Kep/2011, tentang Penugasan Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun 2011;
10. Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2013. Nomor : 447a/HB-Multitahun/UN34.21/2013 tanggal 13 Mei 2013
11. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta No. : DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 5 Desember 2012. Revisi ke-3 No.: DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 6 Mei 2013.

2. Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY No. : 053 Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penetapan Nama dan Judul Penelitian Hibah Bersaing Universitas Negeri Yogyakarta

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul dan nama Ketua/Anggota Peneliti sebagai berikut :

Judul : Pengembangan Model Pengelolaan Kelas Penyelenggara Pendidikan Inklusif tingkat SD di provinsi DIY
 Ketua Peneliti : Hermanto, M.Pd
 Anggota : 1. Nurtanio AP, M.Pd
 2. Sukinah, M.Pd
 3.

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Hibah Bersaing yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 41000000. (empat puluh satu juta rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Yogyakarta No. : DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 5 Desember 2012. Revisi ke-3 No.: DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 6 Mei 2013.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana pasal 1 sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara.

Pasal 3

- Pembayaran dana Penelitian Hibah Bersaing ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Tahap Pertama 70% sebesar Rp 28700000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - (2) Tahap Kedua 20% sebesar Rp 8200000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai softcopy (CD dalam format "pdf") paling lambat tanggal 31 Oktober 2013.
 - (3) Tahap ketiga 10% sebesar Rp 4100000 (empat juta seratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Hasil Kinerja Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) disertai Softcopy (CD dalam bentuk format "PDF".
 - (4) PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dan Laporan Penggunaan Keuangan sejumlah termin I sebesar 70%, dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy masing-masing 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal 15 Agustus 2013.
 - (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.

- o) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Depdiknas Jakarta;
- (2) Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- (3) Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- (4) Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.
- (5) Membayar PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku
- (6) Mengikuti Seminar dari Awal sampai dengan selesai

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian yang dimaksud Pasal 1 ini selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 13 Mei 2013 sampai dengan 20 Nopember 2013, dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian Hibah Bersaing yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **20 Nopember 2013**.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebanyak 6 (enam) eksemplar, dan dalam bentuk soft copy (CD dalam format **"*.pdf"**) sebanyak 1 (satu) keping.
 - b. Artikel Ilmiah untuk dimasukkan ke Jurnal di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY, yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover **Orange**
 - c. Di bagian bawah kulit ditulis :
Dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2013 Nomor: Nomor : 447a/HB-Multitahun/UN34.21/2013 tanggal 13 Mei 2013
- (4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
 - a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - b. PDII LIPI Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - c. BAPPENAS c.q. Biro APKO Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - d. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY sebanyak 3 (tiga) eks.
- (5) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Apabila ketua peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 9

Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



Hermanto, M.Pd,

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Anik Ghufon
NIP. 19621111 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281.
Telp. (0274) 550839 Fax (0274) 518617. e-mail: lppm.ury@gmail.com

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL/INSTRUMEN PENELITIAN**

1. Nama Peneliti : Hermanto, m Pd.
2. Jurusan/Prodi :
3. Fakultas :
4. Skim Penelitian : APHR
5. Judul Penelitian : Pengembangan Model Pengelolaan kelas Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tingkat SD di Provinsi DIY
6. Pelaksanaan : Tanggal 22 Juni 2013 Jam 09.30 - 10.30
7. Tempat : R II LPPM UMY
8. Dipimpin oleh : Ketua Dr. Edi Purwanto, m Pd.
Sekretaris Dr. Tien Aminatun
9. Peserta yang hadir : a. Konsultan : orang
b. Nara sumber : orang
c. BPP : orang
d. Peserta lain : orang
Jumlah : 14 orang

SARAN -SARAN

Prof. Jayan :

- Sudah betul model pengelolaan sekolahnya → sudah bagus.

Prof. Asri :

- Lebih bagus lagi kalau apiknya bisa ditambah.

Dr. Edi Purwanto

Dim. inklusif tidak hanya sekedar pengelolaan kelas, tp. bgmn. masyarakat bisa membantu.

10. Hasil Seminar;

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis, seminar berkesimpulan bahwa proposal penelitian tersebut di atas:

- Diterima, tanpa revisi/pembenahan ~~usulan~~/instrumen/hasil *semi dan*
- Diterima, dengan revisi/pembenahan
- Dibenahi untuk diseminarkan ulang

Ketua Sidang



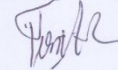
Dr. Edi Puswanta, M.Pd.

NIP: 196011051984031001

Mengetahui
Badan Pertimbangan
Penelitian

Dr. Edi Puswanta, M.Pd.

NIP: 196011051984031001

Sekretaris
Sidang

Dr. Tien Aminatan

NIP: 197207021990022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281.
Telp. (0274) 550839 Fax, (0274) 518617. e-mail: lppm.uny@gmail.com

FRM/LEMLIT-PROG/09-02
04 NOV. 2008

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DANA DESENTRALISASI

1. Nama Peneliti : Hermanto, M. Pd.
2. Jurusan/Prodi : PLB IPB
3. Fakultas : FIP
4. Skim Penelitian : APHB
5. Judul Penelitian : Pengembangan Model Pengajaran Kelas
Menyediakan Pend. Berbasis Rantai SD di UNY
6. Pelaksanaan : Tanggal 18 November 2013 Jam 07.30 - 14.00
7. Tempat : Ruang Sidang LPPM - UNY
8. Dipimpin oleh : Ketua Dr. Ariet Rohman
Sekretaris Hidayat, M.S.
9. Peserta yang hadir : a. Konsultan : orang
b. Nara sumber : orang
c. BPP : orang
d. Peserta lain : orang
Jumlah : orang

SARAN - SARAN

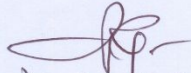
- Memadukan antara model temuan dengan unsur-unsur pengembangan.
- Data lapangan perlu di lengkapi

10. Hasil Seminar;

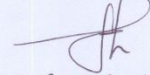
Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tuli seminar berkesimpulan bahwa hasil penelitian tersebut di atas :

- a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan hasil Penelitian
- b. Diterima, dengan revisi/pembenahan
- c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang

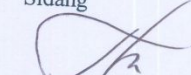
Ketua Sidang


Dr. Arif Robman
NIP:

Mengetahui
Pembahas/Reviewer
Penelitian


@. Asri Budiningsih
NIP:

Sekretaris
Sidang


Haryanto, MS
NIP: 1.9.6.1.06 1719511
1012

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN

Jenis Seminar : Hasil Penelitian Desentralisasi
 Hari, Tanggal : Senin, 18 November 2013
 Pukul : 07.30 - Selesai
 Tempat : Ruang Sidang LPPM
 Kelompok : 1 & 2

No.	N A M A	GELAR	TAMBA TANGAN	
1	RA Rahmi D Andayani	Dra., M.Pd	1.	2.
2	Samsul Ma'arif	Drs., MA	3.	4.
3	Nurhadi	Dr., M.Hum	5.	6.
4	Pujiati Suyata	Prof. Dr.	7.	8.
5	Haryadi	Prof. Dr.	9.	10.
6	Burhan Nurgiyantoro	Prof. Dr., M.Pd	11.	12.
7	SUHARNO	Dr., M.Si	13.	14.
8	Hastuti	Dr., M.Si	15.	16.
9	Haryanto	Dr., M.Pd	17.	18.
10	ALI MUHTADI	Dr., M.Pd.	19.	20.
11	Sujarwo	Dr., M.Pd	21.	22.
12	Nurtanio Agus Purwanto	M.Pd	23.	24.
13	Hermanto	M.Pd	25.	26.
14	Nelva Rolina	M.Si	27.	28.
15	Sugeng Bayu Wahyono	Dr	29.	30.
16	Hiryanto	M.Si	31.	32.
17	Yoyon Suryono	Prof. Dr.	33.	34.
18	Sigit Sanyata	M.Pd	35.	
19	Setya Raharja	M.Pd		
20	Arif Rohman	M.Si		
21	Insih Wilujeng	Dr., M.Pd		
22	Djemari Mardapi	Prof., Ph.D		
23	Sukisman Purtadi	M.Pd		
24	Tri Hartiti Retnowati	Prof. Dr., M.Pd		
25	Wiyatmi	M.Hum		
26	Sumarno	Ph.D		
27	C. Asri Budiningsih	Prof. Dr.		
28	Edi Purwanta	Dr., M.Pd		
29	puji yanti Fauziah	Dr. Mpd		
30	Heri Remawati			
31	Saward			
32				
33				
34				
35				

Yogyakarta, 18 November 2013
 Ketua Sidang

Prof. Dr. Sri Atun

INSTRUMEN PENELITIAN HIBAH BERSAING

TAHUN 2013

A. Identitas Sekolah

Nama Sekolah	:	
Nama Kepala Sekolah	:	
Alamat Sekolah	:	
Telp Sekolah	:	
Ada/Tidak adanya GPK	:	

B. Identifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar.

1. Sejak kapan sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif?
2. Menjadi sekolah inklusi karena penunjukan dari dinas atau usulan sekolah sendiri?
3. Ada berapa siswa berkebutuhan khusus yang terdaftar di sekolah ini?
4. Ada berapa siswa berkebutuhan khusus yang aktif mengikuti pendidikan saat ini?
5. Ada di kelas berapa siswa berkebutuhan khusus tersebut berada & bagaimana sebarannya berkebutuhannya?
6. Adakah permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah terkait dengan adanya siswa berkebutuhan khusus tersebut?
7. Adakah permasalahan yang dihadapi guru terkait dengan adanya siswa berkebutuhan khusus di kelas?
8. Sudah berapa sering pihak sekolah mengirimkan guru untuk mendapatkan wawasan tentang penanganan anak-anak berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan diknas ataupun lainnya?
9. Sudah berapa sering pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan pelatihan dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus?
10. Adakah permasalahan bagi guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas inklusif?
11. Adakah permasalahan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas inklusif?
12. Adakah permasalahan bagi guru dalam melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran di kelas inklusif?
13. Bagaimana pihak sekolah melakukan koordinasi dengan orangtua wali siswa berkebutuhan khusus?
14. Bagaimana pihak sekolah melakukan koordinasi dengan orangtua wali siswa pada umumnya berkaitan dengan siswa berkebutuhan khusus?

C. Gambaran pengelolaan kelas yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar.

1. Bagaimana guru merencanakan pembelajaran di kelas inklusif?
2. Bagaimana guru melaksanakan pembelajaran di kelas inklusif?
3. Bagaimana guru melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran di kelas inklusif?
4. Bagaimana kerjasama antara guru kelas dengan guru pembimbing khusus dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajar?

5. Apakah metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sudah dapat menjangkau semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus?
6. Apakah media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sudah dapat menjangkau semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus?
7. Bagaimana strategi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar menjangkau semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus?
8. Bagaimana memposisikan tempat duduk siswa berkebutuhan khusus selama KBM?
9. Bagaimana guru melibatkan dan menghargai siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran?
10. Bagaimana peran teman sekelas dalam membantu dan menghargai siswa berkebutuhan khusus selama KBM?
11. Adakah kegiatan KBM tambahan bagi siswa berkebutuhan khusus diluar jam?
12. Faktor pendukung apa saja yang dilakukan selama proses pengelolaan kelas?

D. Analisis kebutuhan (*needs assessment*) sekolah dalam pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar.

1. Apakah guru membutuhkan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus?
2. Apakah guru membutuhkan wawasan tentang pendidikan inklusif?
3. Apakah guru membutuhkan pemahaman tentang kelas observasi dan kelas intervensi?
4. Apakah guru membutuhkan pemahaman tentang strategi layanan anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif?
5. Apakah guru membutuhkan pemahaman tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar di kelas inklusif?
6. Apakah guru membutuhkan pemahaman tentang strategi teman sebaya dalam keberhasilan anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif?
7. Apakah guru selalu membutuhkan kerjasama dengan guru pembimbing khusus dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran?
8. Apakah guru selalu membutuhkan kerjasama dengan guru pembimbing khusus dalam strategi pembelajaran pembelajaran?
9. Apakah siswa membutuhkan pemahaman tentang pemahaman dan strategi untuk mendukung keberhasilan teman yang berkebutuhan khusus di kelas inklusif?

E. Untuk keperluan pengembangan modul atau buku tentang model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar.

1. Apakah isi yang harus ada dalam model pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar?
2. Bagaimana jenis huruf yang sesuai untuk modul pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar?
3. Berapa ketebalan halaman yang ideal untuk modul pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar?
4. Perlukah ada banyak gambar dan contoh kasus pengelolaan kelas dalam modul pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar?
5. Bagaimana ukuran kertas untuk modul pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar?

**KELAS INKLUSIF MASIH BANYAK DIKELOLA
SECARA MODEL EKSLUSIF**

Oleh: Hermanto, dkk

Email: hermansp@uny.ac.id atau HP 08121575726, 087739757888

Abstrak

Kebijakan pendidikan inklusif telah digulirkan, sehingga saat ini banyak ditemukan adanya sekolah yang menyelenggarakan kelas inklusif. Penyelenggaraan sekolah atau kelas inklusif dikarenakan adanya tunjukkan dari dinas ataupun karena kesadaran pihak sekolah. Diantara sekian banyak sekolah yang memberikan identitas sebutan sebagai sekolah inklusif ternyata tidak sedikit yang masih menyelenggarakan proses pembelajaran secara eksklusif. Terjadinya penyelenggaraan pembelajaran eksklusif di kelas inklusif dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya: ketidaktahuan guru dalam memperlakukan siswa berkebutuhan khusus di kelas yang heterogen, kebijakan sekolah dan dinas pendidikan belum sepenuhnya mendukung terselenggaranya kelas inklusif, keterbatasan fasilitas atau sarana prasarana, dan yang paling utama adalah belum optimalnya pelatihan riil tentang strategi dan cara mengelola kelas inklusif, penilaian di kelas inklusif, serta keterlibatan supervisi pembelajaran yang intensif untuk keberhasilan pengelolaan kelas inklusif.

Kata Kunci: Kelas inklusif, kelas eksklusif.

abstract

Inclusive education policy has been rolled out, so now many found that the school organizes an inclusive classroom. The implementation of inclusive schools or classes of service due to the show or because awareness of the school. Among the many schools that provide school identity as an inclusive designation was not a little that was exclusively in organizing the learning process. The exclusive organization of learning in an inclusive classroom due to several factors, its happen including: ignorance teachers treat students with special needs in a heterogeneous classroom, school policy and education authorities have not fully support the implementation of inclusive classrooms, facilities or infrastructure limitations, and the main thing is not optimal real training on strategies and how to manage an inclusive classroom, inclusive classroom assessment, and instructional supervision intensive engagement for successful management of an inclusive classroom.

Keywords: *Inclusive Class, Exclusive Class.*

Pendahuluan

Hasil penelitian maupun fakta di lapangan sangat jelas menunjukkan bahwa guru adalah faktor tunggal yang paling penting dan sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keahlian guru dalam mengelola kelas merupakan

kemampuan yang sangat dibutuhkan dan akan sangat mempengaruhi belajar siswa. Guru yang sudah memiliki kemampuan mengelola kelas seperti kelas besar, kelas dengan beragam kondisi siswa tentu akan berhasil membangun potensi, kerjasama dan membangkitkan semangat semua siswa dalam kelas yang diampunya dibandingkan yang belum memiliki kemampuan mengelola kelas. Dengan adanya perbedaan kondisi siswa, guru harus memiliki banyak bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga guru tetap dapat mengelola kelas secara baik.

Dalam sistem seleksi siswa seperti sekarang ini, tentu ada beberapa kemungkinan terhadap keberadaan siswa yang diterima. Kemungkinan *pertama* adalah siswa yang diterima memiliki kondisi fisik dan kemampuan akademik rata-rata atau di atas rata-rata seperti siswa pada umumnya, *kedua*, siswa yang memiliki kondisi fisik seperti siswa pada umumnya tetapi memiliki kemampuan akademik di bawah rata-rata atau mengalami kesulitan dalam satu atau lebih pelajaran tertentu, dan sekilas tidak nampak jelas perbedaan kondisinya dengan siswa lain. Contoh kelompok ini adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam satu atau pelajaran tertentu atau kesulitan belajar spesifik dan juga siswa yang tingkat intelegensinya sekitar 80. *Ketiga*, siswa yang diterima memiliki kondisi fisik berbeda dengan siswa pada umumnya namun memiliki kemampuan akademik yang sama dengan siswa lainnya. *Keempat*, siswa yang secara fisik berbeda dengan siswa pada umumnya dan sekaligus memiliki tingkat kemampuan akademik di bawah siswa pada umumnya.

Perbedaan terhadap kondisi siswa yang diterima di sekolah dimungkinkan sangat berbeda, hal ini bergantung dari kriteria dan sistem penerimaan yang digunakan. Sebagaimana dari kemungkinan empat kelompok di atas, dapat diperjelas sebagai berikut. Untuk kelompok pertama dan kedua adalah kelompok yang biasa terjadi di sekolah pada umumnya, karena sekolah melakukan proses seleksi sekilas terhadap kondisi fisik yang

ada dan data atau keterangan orangtua atau wali. Untuk kelompok ketiga dan keempat, biasanya dilakukan dengan banyak pertimbangan dari pihak sekolah dan orangtua wali siswa. Kelompok ketiga dan keempat inilah yang sekarang banyak terjadi seiring dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif. Untuk kelompok ketiga dan keempat, banyak orangtua yang serta merta karena alasan pendidikan inklusif langsung memindahkan putra putrinya dari sekolah khusus ke sekolah dasar terdekat tanpa melihat kondisi sekolah dan pertimbangan yang matang.

Setelah siswa diterima dalam suatu kelas atau rombongan belajar dalam suatu proses pembelajaran, siapa yang dapat menjamin bahwa karakter dan kondisi siswanya benar-benar homogen atau sama. Model seleksi masuk sekolah yang relatif mengandalkan tes, tentu hanya bisa menjaring pada satu aspek akan tetapi akan sangat sulit untuk menjaring aspek-aspek yang lain yang diperlukan dalam memberikan tindakan selanjutnya. Dengan demikian adalah suatu kewajaran bila masih banyak aspek-aspek lain yang belum terjaring, karena sistem seleksi siswa pada umumnya memang demikian. Namun terlepas dari proses penerimaan siswa dan kondisi siswa, muncullah permasalahan yang lebih penting yaitu bagaimana semua siswa yang ada dalam kelas tersebut mendapatkan perhatian yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan dan potensi semua siswa dalam kelas tersebut dapat berkembangan secara optimal.

Untuk dapat mengembangkan potensi semua siswa termasuk memberikan perhatian yang relatif sama, maka diperlukan kemampuan, kemauan dan pengalaman guru. Syarat *pertama* yang harus dimiliki adalah guru harus menyadari bahwa kondisi siswanya tidak sama sehingga harus melakukan pengelolaan kelas yang berdiferensiasi. Jangan sampai siswa yang sangat heterogen atau beda diperlakukan sama seperti dalam model reguler atau eksklusif. Syarat *kedua* adalah adanya kemauan guru untuk melakukan perencanaan klasikal tetapi juga perencanaan individual dalam pembelajaran. Syarat *ketiga* adalah

adanya kebijakan sekolah yang mendukung tindakan guru dalam pembinaan potensi siswa yang disesuaikan dengan kondisinya. Jangan sampai terulang seperti terjadi dan ditemukan dalam penelitian ini masih banyak terjadi di sekolah dasar inklusif, walaupun guru sudah menyadari akan adanya siswa berkebutuhan khusus namun cara pembelajarannya masih menggunakan cara yang sama “eksklusif” dalam memberikan perlakuan kepada semua siswa.

Kecenderungan Siswa Berkebutuhan Khusus di Kelas Reguler

Dalam kajian manajemen kelas, dan manajemen peserta didik, dikatakan bahwa mengelola kelas dengan kondisi siswa yang homogen relatif tentu saja akan lebih mudah dibandingkan mengelola siswa dengan kondisi yang heterogen baik kemampuannya ataupun kondisi fisiknya. Mengelola pembelajaran dengan kondisi siswa yang homogen dan tingkat kecerdasan yang rata-rata tentunya akan lebih mudah dibandingkan dengan mengelola kelas dengan siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mengelola kelas dengan kondisi siswa yang homogen memiliki kemampuan di bawah rata-rata tentu akan lebih sulit dibandingkan mengelola pembelajaran dengan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Mengelola kelas dengan kondisi siswa yang jauh lebih bervariasi tingkat kecerdasan maupun kondisi penyertanya tentu akan lebih sulit dibanding mengelola kelas reguler dan sebagainya.

Sebagai seorang guru, secara umum tidak memiliki kebijakan untuk menolak atau menerima siswa dalam proses seleksi kecuali menjadi tim penerimaan siswa baru. Guru biasanya tinggal menerima pembagian kelas yang harus diampu atas dasar pembagaian yang diberikan oleh atasan dalam hal ini kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Siapa yang dapat memprediksi dan memastikan bahwa siswa yang ada di kelasnya benar-benar dalam kondisi yang homogen tentu tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini tentu sangat sulit dipastikan, dan akan kurang memberikan kebermanfaatan bagi guru,

sekolah ataupun siswa. Barangkali kita bisa memprediksi homogen secara fisik seperti jenis kelamin, atau asal siswa barang kali relatif mudah, akan tetapi homogen secara kecerdasan atau motivasi tentu sangat sulit diprediksi. Berbeda dengan yang sifatnya fisik, aspek lain yang tidak dapat langsung dilihat seintas dari aspek fisik tentu membutuhkan perhatian yang sangat khusus.

Kita barang kali tidak begitu asing dengan nama **Einstein**. Siapa yang tidak tahu, hampir sebagian orang yang berpendidikan dipastikan mengenalnya. Einstein dengan kemampuannya yang luar biasa menghantarkannya menjadi pribadi yang banyak dikenal orang. Disamping kehebatannya, Einstein memiliki cerita masa lalu yang berbeda dengan-anak-anak pada umumnya, ia baru bisa membaca diusia **kelas empat** sekolah dasar. Berkaca dari kondisi **Einstein**, apakah kita akan katakan kalau ia secara fisik berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tentu saja tidak. Tetapi Einstein sesungguhnya termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Seandainya gurunya waktu itu langsung menyarankan ia pindah ke sekolah khusus (SLB) apa yang terjadi. Itulah sedikit gambaran betapa masih banyak anak-anak yang dulunya diwaktu kecil dianggap bermasalah atau berkebutuhan khusus ternyata menjadi terkenal dan hebat dikala besar. Disinilah pentingnya kearifan sekolah dan guru dalam memberikan layanan kepada semua siswa.

Berbicara tentang siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar reguler atau sekolah dasar inklusif, terlepas telah adanya peraturan pemerintah atau tidak, namun secara fakta ternyata keberadaannya sudah ada sejak lama. Siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler terutama adalah siswa yang tidak memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan siswa pada umumnya atau tidak memiliki hambatan intelektual yang berat. Kita dapat memperhatikan siswa yang memiliki IQ 80 dengan siswa yang memiliki IQ 100, ketika di sekolah dasar kelas satu atau dua, tentu tidak akan kelihatan berbeda secara fisik. Namun di lapangan juga sering terjadi siswa dengan IQ di atas normal tetapi ternyata siswa

tersebut memiliki gangguan penyerta seperti hiperaktif atau gangguan perhatian. Fakta demikian bila tidak hati-hati akan dapat mengecohkan guru dalam memberikan perlakuan selama pembelajaran. Kondisi ini pulalah yang sering terjadi di sekolah, walaupun belum menyebut sebagai sekolah inklusif.

Seiring dengan adanya peraturan pemerintah tentang pendidikan inklusif, dimana sekolah semakin terbuka dan membuka akses untuk siswa berkebutuhan khusus, maka kondisi dan jenis anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler semakin beragam baik yang kelihatan secara fisik maupun non fisik. Apabila sebelum dibukanya akses sebagai sekolah inklusif, siswa yang berada di sekolah reguler adalah siswa dengan kondisi kecerdasan dibawah rata-rata, anak dengan kesulitan belajar tertentu, siswa dengan kehilangan fungsi pendengaran dan atau penglihatan yang ringan, siswa dengan kondisi kelainan fisik yang tergolong ringan, siswa dengan gangguan emosi dan perilaku, siswa dengan hambatan komunikasi dan bahasa, siswa dengan hambatan persepsi, dan sebagainya sehingga tidak kelihatan dan masih termasuk dalam kriteria yang ditetapkan sekolah. Siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler saat ini lebih kompleks, termasuk adanya siswa tunanetra dan tunarungu, bahkan siswa dengan kondisi yang lebih berat.

Tidak Seharusnya Kelas Inklusif Dikelola Secara Eksklusif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif hampir semua sekolah, walaupun sudah menyebut sebagai sekolah inklusif tetapi ternyata dalam proses pembelajaran yang dilakukan masih mendominasi menggunakan model pengelolaan kelas secara reguler yaitu yang biasa digunakan di sekolah reguler selama ini. Sebagaimana yang dilakukan di SD Negeri Butuh yang beralamat di Pereng, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo, dimana sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2011. Sekolah yang dipimpin oleh Drs. Sunardi ini mempunyai tiga siswa yang dikategorikan sebagai siswa berkebutuhan khusus

yang berada di kelas IV dan V. Siswa berkebutuhan khusus di kelas IV ada satu orang siswa dengan kategori sebagai lambat belajar, sedangkan di kelas V ada dua siswa yang juga dikategorikan sebagai siswa lamban belajar. Berdasarkan informasi Ibu Suparti sebagai guru yang mengampu kelas V bahwa sejak merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara reguler.

Tidak berbeda jauh dengan SD Negeri Butuh, SD yang beralamat di Mrincingan, Margomulyo, Seyegan, Sleman inipun melakukan pembelajaran yang sama dengan kelas-kelas reguler. SD Mrincingan yang dipimpin H. Sunarji, S.Pd, SD ini menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2005. Di sekolah ini terdaftar 8 siswa berkebutuhan khusus walaupun yang aktif hanya 7. Sebaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini ada di kelas, I, II, III, V, dan VI. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atas inisiatif sekolah sendiri ini dalam proses pembelajarannya juga masih menggunakan kurikulum reguler dan untuk anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan anak. Walaupun sekolah ini menurut Ibu Siti Astuti Wardayati selaku guru kelas III bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak dipisah dengan siswa lainnya, namun penilaian bagi anak berkebutuhan khusus telah dilakukan tersendiri dengan cara menurunkan bobot nilai yang tidak sama.

Sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Gunung Kidul dalam penyelenggaraan pembelajaran juga belum melaksanakan sebagaimana pengelolaan kelas inklusif yang sesungguhnya. Dari beberapa sekolah yang diberi angket, diwawancarai dan disurvei. Salah satunya adalah SD Negeri Ngeposari II, sekolah ini beralamat di Mojo, Ngeposari, Semanu, Gunung Kidul menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2008 atas tunjukkan dari dinas. Sekolah yang memiliki 42 siswa berkebutuhan khusus ini tak ubahnya seperti sekolah khusus atau SLB karena jumlah anak berkebutuhan khusus yang sangat banyak dan menyebar disemua kelas. Sekolah yang dipimpin oleh Romdloni,

S.Pd, SD ini belum merencanakan pembelajaran untuk kelas inklusif secara baik dan terencana, atau masih sama dengan merencanakan dan mengelola kelas reguler atau bukan inklusif. Menurut Ibu Evi Setyowati bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan juga belum maksimal.

Tidak jauh berbeda dengan tiga sekolah di atas maka untuk sekolah yang ada di Bantul, sebagaimana SD Jolosutro Piyungan Bantul bahwa sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2002, dan jumlah siswa berkebutuhan khusus saat ini ada 35 siswa. Dari sejumlah siswa berkebutuhan khusus tersebut tersebar di kelas I ada 5 siswa, kelas II ada 3 siswa, kelas III ada 6 siswa, kelas IV ada 8 siswa, kelas V ada 5 siswa dan di kelas VI ada 7 siswa. Sekolah ini telah memiliki guru pembimbing khusus (GPK) yang mendampingi selama dua hari dalam setiap minggunya. Sekolah ini sudah sering mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif. Dalam pembelajaran sekolah ini telah menyelenggarakan pembelajaran secara klasikal dan mencoba memberikan pelayanan pembelajaran secara individual. Namun demikian secara fakta di kelas, guru belum secara optimal menyusun program pembelajaran dengan prinsip pembelajaran individual demikian pula dalam pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belum menerapkan pembelajaran individual yang sesungguhnya.

Berdasarkan sedikit fakta yang ditampilkan di atas, bahwa guru khususnya yang mengampu di kelas inklusif yang didalamnya terdapat siswa berkebutuhan khusus membutuhkan strategi khusus agar semua potensi siswa dapat berkembang secara maksimal. Bagaimana siswa yang tidak berkebutuhan khusus dapat terlayani dengan baik tetapi untuk yang tergolong anak-anak berkebutuhan khusus juga tidak terabaikan atau sebaliknya. Dalam menghadapi kelas yang demikian, kelas yang heterogen maka dibutuhkan strategi bagi guru. Guru yang sebelumnya tidak membekali diri dengan pemahaman akan individu berkebutuhan khusus akan langsung memberikan rekomendasi

agar pindah sekolah. Tentu saja untuk dapat mengelola kelas inklusif yang sesungguhnya sangat dibutuhkan adanya kreativitas guru, kesungguhan, kemauan guru dan didukung semua elemen sekolah. Mengelola kelas inklusif dengan adanya heterogenitas siswa membutuhkan kesiapan guru dalam membuat media, merencanakan pembelajaran baik secara klasikal maupun individual dan strategi pembelajarannya.

Kendala dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kelas Inklusif

Pendidikan iklusif telah digulirkan dan bahkan sebelum munculnya layanan pendidikan inklusif telah ada istilah pendidikan terpadu yang menjadi bentuk layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Sebagai perkembangan dalam layanan untuk individu berkebutuhan khusus maka muncullah istilah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah salah satu kebijakan di tingkat pusat setidaknya ditandai dengan adanya peraturan menteri pendidikan nomor 70 tahun 2009. Kebijakan atau peraturan menteri tersebut apabila dilakukan akan berimplikasi pada banyak hal, namun akan sangat menghargai kondisi anak berkebutuhan khusus yang sesungguhnya suatu kondisi yang tidak diharapkan dari semua orang. Konsekuensi dan implikasi tersebut akan tercermin dari keterlibatan siswa yang dikatakan normal, guru, kepala sekolah dan atau yayasan, dinas pendidikan, dan bahkan orangtua siswa atau masyarakat sekitar.

Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk salah satu provinsi yang memiliki semangat untuk mensukseskan terselenggaranya pelaksanaan pendidikan inklusif. Penguatan ini dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan. Begitu pula misalnya di Kota Yogyakarta telah diterbitkan peraturan walikota (perwal) nomor 47 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, dan diikuti dengan sosialisasi juknis nomor 188/200/0026 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Namun semua itu akan menjadi sangat sia-sia bila tidak diikuti dengan

adanya sanksi bagi sekolah atau lembaga yang melanggar atau tidak melakukannya. Dengan demikian kebijakan tersebut harus diikuti dengan kebijakan pendukungnya.

Tidak dipungkiri bahwa peraturan tentang kebijakan pendidikan inklusif adalah payung hukum yang sangat bagus, namun tanpa adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak maka kebijakan tersebut menjadi kurang bermakna. Masih sangat lemahnya dukungan terhadap kebijakan inklusif setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: kebijakan belum diikuti dengan monitoring yang jelas untuk setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, kurang adanya keseriusan pihak sekolah dan dinas dalam mensosialisasikan dan melakukan monitoring evaluasi terprogram tentang pendidikan inklusif. Selain itu pelatihan intensif yang menuntut guru mampu merencanakan program, dilanjutkan pembelajaran di kelas inklusif, dan hasilnya dievaluasi bersama sebagaimana dalam pelaksanaan supervisi klinis tentu akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi guru, sekolah dan bahkan penilik, maupun kelompok kerja sekolah inklusif sebagai mitra dalam *lesson study* pendidikan inklusif.

Kendala dalam pengelolaan kelas inklusif selain dikarenakan belum dimilikinya banyak wawasan dari guru selaku pengelola kelas, juga disebabkan masih sangat terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang terlaksananya pendidikan inklusif. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari subjek penelitian hampir semua sekolah masih sangat merasakan adanya banyak keterbatasan sarana prasarana dalam menunjang keberhasilan pendidikan inklusif. Sebagai misal untuk mengajarkan tentang kerangka manusia pada siswa tunanetra di kelas inklusif, ternyata sekolah belum memiliki peraga tersebut, belum lagi media-media pembelajaran lainnya. Untuk itu dengan masih sangat terbatasnya fasilitas pendukung baik yang berupa media pembelajaran, kebijakan dan ketrampilan mengelola kelas inklusif tentu akan sangat melingkupi sulitnya

mengimplementasikan pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar yang sudah menyebut lembaganya sebagai sekolah inklusif.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pertama tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah inklusif dalam pengelolaan kelas, sebagai salah satu yang menjadi tujuan penelitian diperoleh gambaran bahwa secara fakta banyak ditemukan adanya siswa berkebutuhan khusus terutama yang tidak memiliki kelainan yang mencolok secara fisik seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sehingga guru tidak dengan mudah mengenali kekhususan yang dialami si siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, baik yang sudah menyelenggarakan pendidikan iklusif ataupun yang baru mendapatkan sosialisasi tentang pendidikan inklusif, hampir semuanya menyatakan bahwa setiap kelas hampir pasti dapat ditemukan adanya siswa berkebutuhan khusus. Ditemukannya siswa berkebutuhan khusus, walaupun guru belum berani mengatakan secara tegas dan pasti tetapi sebagian besar guru terutama di sekolah dasar selama proses pembelajaran menyatakan adanya tanda-tanda yang teramati menunjukkan kondisi berkebutuhan khusus.

Guru-guru yang mengampu di sekolah dasar sebagian besar mengalami dan menemukan adanya kasus siswa ditengarai berkebutuhan khusus, namun karena guru belum mengetahui cara melakukan assesmen yang benar dan strategi pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus, maka dalam proses pembelajaran guru di sekolah dasar tetap memberikan perlakuan kepada siswa berkebutuhan khusus dan siswa umumnya dengan cara yang sama. Guru belum merencanakan pembelajaran secara khusus apalagi menyiapkan penilaian. Berdasarkan hasil penelitian yang difokuskan pada kebutuhan guru di sekolah inklusif, maka mereka sangat mengharapkan adanya banyak pelatihan untuk membekali diri dalam merencanakan, proses pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Dengan demikian cara pembelajaran untuk siswa yang heterogen di kelas inklusif tidak lagi diperlakukan dan dikelola seperti kelas-kelas reguler atau eksklusif.

Daftar Rujukan

- Denis & Ny. Enrica dengan editor Mohammad Sugiarmun & MIF Baihaqi. (2006). *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa (terjemahan *Inclusion, School for All Student*. Karya J. David Smith. 1998).
- Hermanto, (2010) *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Khusus.
- Hermanto, (2010). *Kemampuan Guru dalam Melakukan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Laporan Penelitian.
- James Levin & James F. Nolan. (1996). *Principles of Classroom Management*. USA: by Allyn & Bacon.
- Jones, Vern and Jones, Louise. (2012). *Manajemen Kelas Komprehensif* (terjemahan). Jakarta: Kencana Prenada.
- Lampiran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang *Standar Isi*. Jakarta: Depdiknas.
- Suharsimi Arikunto. (1993). *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparno, Heri Purwanto, Edi Purwanto. (2007). *Modul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Konsorsium PJJ PGSD UT.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2009). *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Depdiknas.